

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

(LKjIP)

SEKRETARIAT DPRD

2025



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2026**



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk itu ditetapkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, yaitu “**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**” dengan indikator **Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Point)**.

Pada tahun 2025 dengan target kinerja sebesar 96,00 Point dan capaian kinerja sebesar 97,29 Point, maka capaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025 adalah sebesar 101,34%.

Table 1
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	%
			2025	2025	
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point)	96,00	97,29	101,34

Sumber Data : Diolah Tim Tahun 2025



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar tidak lepas dari kerjasama antar bagian di dalam Sekretariat DPRD atau dengan perangkat daerah yang lain.

Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 ini, diucapkan terima kasih

Liwa, Februari 2026





IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD didukung oleh ketersediaan anggaran yang tertuang dalam APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025. Sekretariat DPRD pada tahun 2025, melaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 59 (Lima puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran belanja daerah Sekretariat DPRD Tahun 2025 setelah perubahan sebesar Rp.38.979.182.417,- (Tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) terealisasi sebesar Rp.38.674.240.497,- (Tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 99,22 % (Sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua persen). Dengan SILPA sebesar Rp.304.941.920,00 (tiga ratus empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 telah ditetapkan tujuan yaitu **“Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas”** dengan sasaran yang ditetapkan yaitu **“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD”** dengan indikator **Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point)** dengan target kinerja 96,00 Point dan terealisasi 97,29 Point atau sebesar 101,34%.

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang diamanatkan penugasannya kepada Kepala Bagian dan Kepala sub bagian ataupun pejabat fungsional tertentu melalui Perjanjian Kinerja.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, terdapat perubahan baik itu penambahan atau pengurangan anggaran, penambahan



Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

sub kegiatan ataupun penambahan target kinerja sub kegiatan, yang menyebabkan adanya Perubahan Perjanjian Kinerja.

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 yang baik dan memuaskan ini salah satunya karena adanya dukungan aparatur Sekretariat DPRD yang sudah bekerja dengan optimal. Walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik dari internal maupun eksternal.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2025, terdapat perubahan anggaran dikarenakan efisiensi anggaran.

Liwa, Februari 2026



NIP. 19800407 200902 1 002



DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR DIAGRAM	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Peran Strategis Perangkat Daerah	4
E. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Perangkat Daerah	6
1. Strategi dan Arah kebijakan	7
2. Program dan Kegiatan Pembangunan	10
B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan	11
C. Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Renstra	15
BAB III KAPASITAS ORGANISASI	
A. Analisis Sumber Daya Manusia	16
B. Analisis Sarana dan Prasarana	18
C. Analisis DPA Tahun Anggaran 2025	18
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Tindak Lanjut LHE AKIP Perangkat Daerah	23



B. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	24
C. Perbandingan Kinerja	34
1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelum	34
2. Perbandingan Pencapaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2025 dengan Sekjen DPR RI.....	36
3. Perbandingan Pencapaian IKU Sekretariat DPRD Tahun 2025 dengan Sekretariat DPRD Prov. Lampung ...	37
4. Benchmarking	37
D. Realisasi Anggaran	37
E. Pemanfaatan Laporan Kinerja	41
C. Survey Kepuasan Anggota DPRD Kab. Lampung Barat	41
 BAB IV PENUTUP	 39

LAMPIRAN

- Lampiran I : Rencana Aksi Kinerja Per Kegiatan
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perubahannya
Lampiran III : Dokumentasi Kegiatan Pembangunan
Lampiran IV : Daftar Penghargaan



DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat Tahun 2025	i
Tabel 2	Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD	7
Tabel 3	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan Sekretariat DPRD	8
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kab. LB Tahun 2025 ..	12
Tabel 5	Rekapitulasi Anggaran dari Sekretariat DPRD yang tertuang dalam RENJA, PK dan Perubahan PK 2025	13
Tabel 6	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	16
Tabel 7	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Tabel 8	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Kelas	17
Tabel 9	Rekapitulasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025	19
Tabel 10	Capaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kab. LB Lampung Barat Tahun 2022 - 2024	35
Tabel 11	Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kab. LB Tahun 2025	38



DAFTAR DIAGRAM

HALAMAN

Diagram 1 Capaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2024 25

Diagram 2 Perbandingan Target dan Serapan Anggaran Tahun 2024 40



DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. LB	3
Gambar 2 Tindak Lanjut LHE AKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 ..	23
Gambar 3 Peta Bisnis Kegiatan Survei Kepuasan Anggota DPRD	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pemberian kinerja. Pemberian kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan dengan memperhatikan keselarasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).



Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sasaran strategis dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan informasi, kehumasan dan keprotokolan DPRD;
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- f. penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD; dan
- g. penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian rancangan peraturan daerah.



C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Umum dan Kehumasan membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
3. Jabatan Fungsional.

c. Bagian Keuangan

Membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

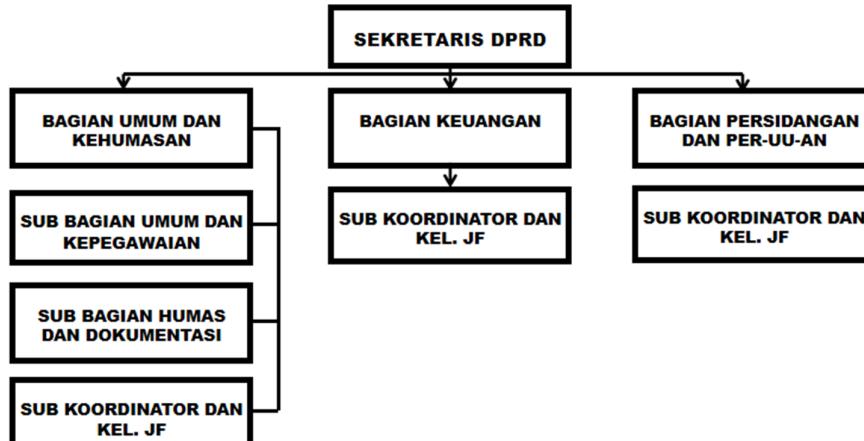
d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Gambar 1

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



Sumber : JDIH Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.



D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa DPRD dan Kepala Daerah dalam hal ini yaitu Bupati memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan yang berarti tidak saling membawahi karena mengingat kedudukan keduanya yang sejajar. DPRD sebagai lembaga legislatif yang merupakan wakil rakyat dalam penyampaian aspirasinya. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD dituntut berperan aktif karena hal tersebut merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sehingga apabila dilihat dari tugas dan fungsinya tersebut, Sekretariat DPRD memiliki peran strategis sebagai pemberi pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dan sebagai penghubung/koordinastor antara DPRD dengan Pemerintah daerah.

Dengan berhasilnya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD maka pelaksanaan pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik.

E. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD yang diuraikan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026 ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal-hal sebagai berikut :



- a. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
- b. Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi masyarakat;
- c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD dan DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD;
- d. Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi terkait dengan kinerja anggota DPRD dan aparatur Sekretariat DPRD;
- e. Belum optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan bahan penyusunan produk hukum Raperda, Peraturan dan Keputusan;



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tertentu, yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026 yang tersusun dapat dijadikan sebagai langkah penyelarasan tujuan, sasaran dan skala prioritas program dan kegiatan dalam Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul di Sekretariat DPRD selama tahun 2023-2026.

Pada RPD Tahun 2023-2026, ditetapkan 5 (lima) tujuan dan sasaran. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD mempunyai tugas untuk ikut mendukung pencapaian Tujuan ke 4 (empat) yaitu **“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN”** dengan sasaran **“MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”**.

Pelayanan Sekretariat DPRD bersinergi dengan pelaksanaan tujuan ke-4 dengan sasaran ke-1 yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, terutama **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dengan sasaran yang ditetapkan yaitu **Meningkatnya Kualitas Penyeleggaraan**



Pemerintahan maka ditetapkan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu **Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas**. Sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**.

Tabel 2
Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH			RENSTRA SEKRETARIAT DPRD		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6
Tujuan ke-4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan”		Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point)
		Nilai SAKIP			

Sumber data : Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026

1. Strategi dan Arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat DPRD mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif dan efisien. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu



sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah

Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkret dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD telah ditetapkan strategis dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TUJUAN KE 4 RPD	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN		
SASARAN KE -1 RPD	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Terwujudkan dukungan dan fasilitasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan	1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan	1. Penyusunan SOP kegiatan yang baik dan benar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi



pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	Sekretariat DPRD	dan pengawasan kegiatan kesekretariatan dan keuangan	2. aparatur. Peningkatan kualitas, kompetensi dan pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Aparatur Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, bimbingan teknis, kursus dan seminar. Peningkatan pengawasan internal kegiatan kesekretariatan dan keuangan. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui kegiatan pemeliharaan aset.
			2. Meningkatkan dukungan layanan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 1. Peningkatan koordinasi antar Bagian dalam rangka penyusunan rencana kerja DPRD 2. dan pelaksanaan kegiatan DPRD. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga Legal Drafter melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar. Peningkatan kualitas dan kompetensi anggota DPRD dalam hal penyusunan produk hukum daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar. 4. Peningkatan kualitas penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan yang efektif dan efisien. Peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi anggaran melalui pelaksanaan rapat pembahasan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien. Peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan DPRD melalui pengagendaan kegiatan kunjungan kerja dan rapat yang lebih jelas dan sistematis.



		<p>3. Meningkatkan penyelenggaran pelayanan aspirasi masyarakat;</p> <p>4 Meningkatkan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada masyarakat;</p>	<p>1. Peningkatan sosialisasi dan aksestabilitasi website DPRD sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat.</p> <p>2. Peningkatan kualitas dukungan dan fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui pendampingan kegiatan reses dan kunjungan kerja dalam daerah.</p> <p>3. Peningkatan kualitas penghimpunan dan penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD.</p> <p>1. Peningkatan kualitas dan jangkauan website DPRD sebagai sarana penyampaian informasi kinerja DPRD.</p> <p>2. Peningkatan kualitas penyusunan bahan publikasi kinerja DPRD.</p> <p>3. Peningkatan penyampaian informasi kinerja kegiatan DPRD melalui optimalisasi kegiatan publikasi melalui media cetak, elektronik dan media online.</p>
--	--	--	---

Sumber data : Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Program dan Kegiatan dan yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 adalah :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
9.	Layanan Administrasi DPRD



B.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7.	Pembahasan Kerja Sama Daerah
8.	Fasilitasi Tugas DPRD

B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025, adalah sebagai berikut :



Tabel 4
Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point)	96,00

Sumber data : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD 2025

Pada Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2025, sesuai dengan Renstra Sekretariat DPRD maka yang menjadi tanggung jawab Sekretaris DPRD adalah adalah terealisasinya sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point) dengan target 96,00 Point.

Perjanjian kinerja tahun 2025 dilakukan pada awal tahun yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada APBD tahun 2024, beserta pemegang tanggung jawab pada setiap tingkatan. Perjanjian Kinerja Perubahan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Perubahan APBD tahun 2025.

Walau terdapat perubahan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat namun tidak berakibat pada perubahan target kinerja sasaran strategis atau tingkat Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Sekretaris DPRD. Hal ini dikarenakan, pada indikator sasaran strategis yang ditetapkan adalah kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD yang sifatnya menyeluruh tidak secara langsung terkait dengan keluaran atau target kinerja dari setiap sub kegiatan/kegiatan.

Tahun 2025, anggaran Sekretariat DPRD yang tertuang dalam usulan Renja Sekretariat DPRD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :



Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Tabel 5

Rekapitulasi Anggaran dari Sekretariat DPRD yang Tertuang dalam Usulan RENJA, Perjanjian Kinerja 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Pagu		
		Usulan RENJA	APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.796.581.780	23.736.552.305	23.705.025.205
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	203.524.000	233.465.400	202.554.600
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.121.314.500	3.256.388.938	3.227.330.141
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.527.000	10.572.000	8.857.000
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	152.552.500	214.277.500	198.970.000
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.020.245.000	2.703.766.300	2.244.424.300
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.719.100	370.454.300	368.207.100
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	957.920.380	567.531.950	530.191.950
8.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15.839.769.300	15.657.785.392	16.182.816.226
9.	Layanan Administrasi DPRD	1.018.010.000	1.007.125.000	836.438.000



Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

B.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	21.979.076.394	17.627.079.300	15.179.393.100
1.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	710.817.500	1.677.002.500	932.701.100
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	252.485.000	329.245.000	106.055.000
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	475.489.000	312.580.600	45.750.000
4.	Peningkatan Kapasitas DPRD	6.255.697.094	6.138.020.200	5.441.691.000
5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.648.305.000	1.898.054.000	1.017.441.000
6.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	455.055.800	366.942.000	184.955.000
7.	Fasilitasi Tugas DPRD	9.877.852.000	6.905.235.000	7.450.800.000

Sumber data : Diolah Tim 2025



C. Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Renstra

Berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026, target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 adalah :

Tabel 6
Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah tahun			
			2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point)	95,00	95,50	96,00	96,50

Sumber Data : Renstra Sekretariat DPRD 2023-2026

Tahun 2025 adalah tahun kedua pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026, yang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Pada tahun 2025 ini sasaran strategis Sekretariat DPRD yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD dengan indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan satuan Point dengan target kinerja 96,00 Point.



BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD didukung oleh 36 orang ASN dari Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional sampai dengan staf, dengan latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan yang berbeda beda.

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan adalah seperti pada Tabel:

Tabel 6

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Pendididikan	Jumlah	Komposisi(%)
1.	SLTA	4 Orang	11,11
2.	Sarjana Muda	0 Orang	0,00
3.	Sarjana / S1	22 Orang	61,11
4.	Pasca Sarjana / S2	10 Orang	27,78
	Jumlah	36 Orang	100,00

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2025 berdasarkan jenis kelamin adalah seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 7

KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Komposisi (%)
1.	Pria	23 Orang	63,89
2.	Wanita	13 Orang	36,11
	Jumlah	36 Orang	100,00

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025



Sedangkan Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2024 berdasarkan Golongan adalah seperti pada Tabel dibawah ini :

Tabel 8
KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN/KELAS

No.	Golongan	Jumlah	Komposisi (%)
1.	Golongan IV	3 Orang	8,33
2.	Golongan III	28 Orang	77,78
3.	Golongan II	1 Orang	2,78
4.	Penata Layanan Operasional	1 Orang	2,78
5.	Pengadministrasi Perkantoran	3 Orang	8,33
	Jumlah	36 Orang	100,00

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2025.

Pengisian formasi jabatan struktural pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat ini menunjukan keadaan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Dewan, Eselon II/b belum terisi
- b. 3 (tiga) Kepala Bagian, Eselon III/a terisi
- c. 2 (dua) Kepala Sub Bagian, Eselon IV/a terisi.

Berdasarkan komposisi PNS yang dimiliki Sekretariat DPRD, dibandingkan dengan beban kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, masih terdapat kekurangan PNS. Berdasarkan ANJAB yang telah dilakukan masih terdapat kekurangan PNS pada jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu.

Seperti pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian masih terdapat kekurangan PNS yang memiliki kompetensi yang baik untuk menangani masalah kepegawaian, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan masih sangat memerlukan penambahan PNS yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang baik terkait urusan perisalah persidangan, perancang perundang-undangan dan juga pendamping komisi. Dan pada bagian keuangan khusus di bidang yang menangani



perencanaan masih perlu mendapat tambahan personil yang berkualitas untuk menangani beban kinerja perencanaan yang relatif banyak.

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Dimana sarana dan prasarana berupa kendaraan roda empat, roda dua, bangunan gedung, perlengkapan dan peralatan kantor. Dengan adanya sarana dan prasarana yang relatif baik dan lengkap, sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD pada tahun 2025 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 59 (Lima puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran belanja daerah Sekretariat DPRD Tahun 2025 setelah perubahan sebesar Rp.38.979.182.417,- (Tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) terealisasi sebesar Rp.38.674.240.497,- (Tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 99,22 % (Sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua persen).

Dibandingkan dengan tahun 2024, setelah perubahan sebesar 39.544.374.105,00 (Tiga puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu seratus lima rupiah), maka anggaran Sekretariat DPRD tahun 2025 mengalami **PENURUNAN**.



Penurunan anggaran ini dikarenakan ada beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 karena adanya pemilihan anggota legislatif 2024, yaitu pelantikan anggota DPRD, Pelantikan Pimpinan DPRD, Kegiatan Orientasi DPRD, Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Penyusunan Kode Etik dan Tata Beracara dan pada tahun 2025 tidak dilaksanakan. Dan juga adanya kebijakan anggaran dari pemerintah pusat dengan adanya kebijakan **EFISIENSI ANGGARAN**. Sehingga untuk beberapa mata anggaran harus mengalami pengurangan.

Untuk lebih jelasnya Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025, dari APBD sampai dengan Perubahan APBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9
Rekapitulasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan APBD
1	2	3
I	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	23.705.025.205
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.554.600
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.441.200
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.981.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.214.000
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.995.800
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	9.908.600
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.059.000
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.955.000
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.227.330.141
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.175.249.141



2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.315.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.565.000
4.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemerikasaan	12.988.000
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.303.000
6.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.910.000
C.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.857.000
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.857.000
D.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.970.000
1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.760.000
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	196.210.000
E.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.244.424.300
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	220.496.400
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.235.000
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	331.408.700
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.250.000
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	254.654.200
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	969.045.000
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.750.000
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.585.000
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.207.100
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	181.475.000
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.732.100



G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.191.950
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.860.000
2.	Pemeliharaan Mebel	24.000.000
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.241.620
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181.090.330
H.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.182.816.226
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.516.316.226
2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	304.500.000
3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	362.000.000
I.	Layanan Administrasi DPRD	836.438.000
1.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	43.140.000
2.	Fasilitasi Fraksi DPRD	1.298.000
3.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	792.000.000
II.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.179.393.100
A.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	932.701.100
1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6.075.000
2.	Pembahasan Rancangan Perda	429.441.100
3.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	497.185.000
B.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	106.055.000
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	16.975.000
2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	14.950.000
3.	Pembahasan APBD	29.470.000



4.	Pembahasan APBD Perubahan	25.420.000
5.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	19.240.000
C.	Pengawasan Pemerintahan	Penyelenggaraan
		45.750.000
1.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	15.250.000
2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15.250.000
3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonominian	15.250.000
D.	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.441.691.000
1.	Pendalaman Tugas DPRD	2.532.893.000
2.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210.535.000
3.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	42.920.000
4.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2.655.343.000
E.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.017.441.000
1.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	130.000
2.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	9.287.000
3.	Pelaksanaan Reses	1.008.024.000
F.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	184.955.000
1.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	184.955.000
G.	Fasilitasi Tugas DPRD	7.450.800.000
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.912.633.000
2.	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	11.722.000
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	115.963.000
4.	Fasilitasi Tugas Pimpinan	3.410.482.000

Sumber data : Diolah Tim 2025



BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tindak Lanjut LHE AKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 Sekretariat DPRD, maka terdapat rekomendasi tindak lanjut yaitu guna meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi agar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menginformasikan perbandingan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) seperti dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Lain.

Gambar 2

TINDAK LANJUT LHE AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

SEKRETARIAT DPRD

Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Perangkat Daerah Tahun 2025
Sekretariat DPRD

NO.	REKOMENDASI LHE AKIP TAHUN 2025	RENCANA TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS PROGRES PELAKSANAAN
1.	Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi agar dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menginformasikan perbandingan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) seperti dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Lain.	Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dengan memasukkan perbandingan kinerja dengan organisasi sejenis ditingkat pusat/nasional dan dengan daerah atau kabupaten lain.	1 Dokumen	2 (dua) Bulan Februari-Maret 2026 (Menunggu LKjIP dari Setjen DPR-RI dan juga daerah lain) Sampai saat ini berdasarkan hasil pencarian belum terdapat LKjIP tahun 2025 dari Setjen DPR-RI atau LKjIP Sekretariat DPRD daerah lain.	Bagian Keuangan	Dalam Proses





Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT SEKRETARIAT DPRD

JL. Raden Intan II Nomor 2 Way Mengaku, Liwa 34811
Telp. (0728) 21112

Liwa, 3 Februari 2026

Kepada Yth,

Nomor : 175/ 23 /I.02/2026 Bapak Bupati Lampung Barat
Lampiran : 1 (satu) lembar Cq. Inspektor Kabupaten
Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut LHE AKIP Di -
Tahun 2025 dari Sekretariat DPRD-LB. Liwa

Menindaklanjuti surat Bupati Lampung Barat Nomor : 701/U-327/I/2026 tanggal 20 Januari 2026 Perihal : Evaluasi SAKIP 2026, maka perangkat daerah diminta menyampaikan informasi tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan informasi tindak lanjut LHE AKIP Tahun 2025 dari Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat (terlampir).

Demikian disampaikan dan terima kasih.



4S	INSPEKTORAT	PENYAMPAIAN TINDAK LANJUT LHE AKIP TH 2025	maudi	04/02

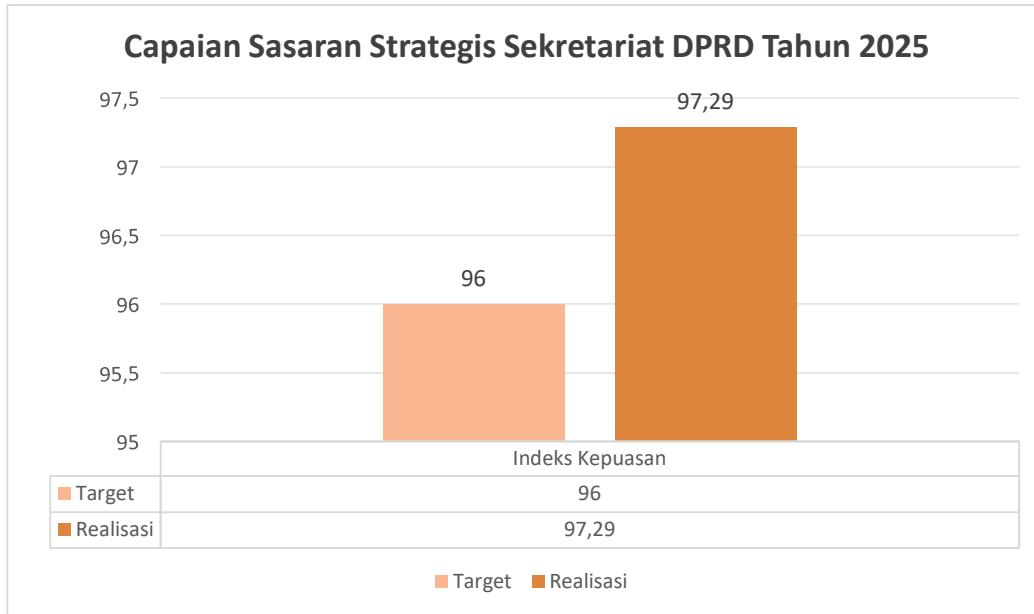
B. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025, seperti pada diagram dibawah ini:



Diagram 1

Capaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2025



Pada tahun 2025, dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan yaitu Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point) dengan target kinerja 96,00 Point terealisasi sebesar 97,29 Point yang berarti terealisasi sebesar 101,34%.

Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Point) dengan realisasi 97,29 Point didapat dari hasil survey kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam hal ini **PUSAT STUDI HUKUM DAN PEMBANGUNAN (PUSHIBAN) UNIVERSITAS LAMPUNG**.

Survey dilakukan dengan memberikan kuisioner yang terdiri dari 2 Aspek, yaitu:

1. **Expected Service (Pelayanan yang Diharapkan) terdiri dari :**
 - A. **Word of Mouth (Layanan Keseharian) dengan 4 pernyataan.**
 1. Gaya Komunikasi Staf Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD



2. Kejelasan Informasi yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD
3. Sikap Penerimaan oleh Pegawai Sekretariat DPRD atas Masukan Anggota DPRD
4. Pola Koordinasi antara Pegawai Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD

B. Personal Needs (Layanan Kebutuhan Pribadi) dengan 5 pernyataan.

1. Jaminan Berupa Kebutuhan fisik yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD kepada masing-masing anggota DPRD (seperti Konsumsi pada Kegiatan Tertentu, Fasilitas Rapat, dan Instrumen Kebutuhan Anggota DPRD Lainnya)
2. Kebutuhan Rasa Aman, Nyaman, dan Rasa Keadilan untuk Memperoleh Pelayanan Terkait Hak dan Kewajiban Anggota DPRD
3. Terpenuhinya Kebutuhan Sosial Anggota DPRD (seperti Pengakuan sebagai Anggota DPRD dan Keterbukaan dalam Partisipasi Anggota DPRD)
4. Adanya penghargaan atas prestasi anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD
5. Jaminan Terpenuhinya Kebutuhan Aktualisasi Diri Anggota DPRD oleh Sikap Pegawai Sekretariat DPRD (Seperti Mengakui Pendapat Anggota, Mengakui Kesalahan Diri, dan Kemampuan Menyesuaikan Diri dengan Situasi)

C. Past Experience (Pengalaman Lampau) dengan 3 pernyataan.

1. Pegawai Sekretariat DPRD memiliki Pengalaman yang Mumpuni dalam Memberikan Pelayanan Kepada Anggota DPRD



2. Pegawai Sekretariat DPRD Memiliki Kemampuan dalam Mengimplementasikan Prosedur, Kebijakan atau Informasi Lain yang Dibutuhkan Anggota DPRD
3. Penguasaan Pegawai Sekretariat DPRD dalam Pelaksanaan Aspek-Aspek Teknis Peralatan dan Teknik Pekerjaan Dalam Melayani Kebutuhan Anggota DPRD

Hasil survei pada Aspek Expected Service (Pelayanan yang Diharapkan) anggota DPRD dari Sekretariat DPRD disimpulkan bahwa ekspektasi tertinggi terdapat pada indikator Pegawai Sekretariat DPRD memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan anggota DPRD dan indikator Pegawai Sekretariat DPRD memiliki kompetensi atau kemampuan teknis dalam pelaksanaan aspek-aspek teknis peralatan dan teknik pekerjaan dalam melayani kebutuhan anggota DPRD dengan skor Likert sebesar 3,00 atau dengan rentang kriteria 100 persen.

Sementara ekspektasi Anggota DPRD Lampung Barat terendah pada aspek Sikap penerimaan oleh pegawai Sekretariat DPRD atas masukan yang diberikan oleh Anggota DPRD dengan skor Likert sebesar 2,91 atau dengan rentang kriteria sebesar 97,14 persen. Selain itu, terdapat dua aspek yang memperoleh skor di bawah rata-rata 98,88 yaitu kejelasan informasi yang diberikan oleh pegawai Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD dan indikator adanya penghargaan atas prestasi anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD masing-masing pada rentang kriteria 98,10.

Dengan demikian secara keseluruhan hasil survei ekspektasi Anggota DPRD terhadap Layanan yang diberikan Sekretariat DPRD sebesar 2,92 pada skala Likert. Apabila dihitung dengan rentang kriteria diperoleh hasil ekspektasi layanan sebesar 97,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada kriteria ini kategori penilaian berada pada kriteria “Tinggi” atau “Baik”.



2. Perceived Service (Pelayanan yang Diterima)

A. Tangibles (aspek bukti nyata) dengan 8 pernyataan.

1. Kebersihan Gedung dan Toilet Kantor Sekretariat DPRD
2. Kualitas Penataan Eksterior Kantor Sekretariat DPRD
3. Kualitas Interior dan Kerapihan Kantor Sekretariat DPRD
4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kantor DPRD
5. Kenyamanan Fasilitas Visual di Sekretariat DPRD
6. Kemudahan Anggota dalam Menggunakan Fasilitas yang ada di Sekretariat DPRD
7. Penampilan dan Kerapihan Pegawai Sekretariat DPRD
8. Kemampuan Pegawai Sekretariat DPRD dalam Menggunakan Teknologi Informasi

B. Reliability (aspek kehandalan) dengan 4 pernyataan.

1. Kemampuan pegawai Sekretariat DPRD dalam menjalankan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya
2. Kemampuan pegawai Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan dengan akurat dan tepat waktu kepada Anggota DPRD
3. Kemampuan pegawai Sekretariat DPRD dalam memberikan layanan dengan kehandalan dan hasil memuaskan terhadap Anggota
4. Kemampuan Pegawai dalam Penyimpanan Dokumen Administrasi yang Dibutuhkan Anggota DPRD

C. Responsiveness (aspek respon atau daya tanggap) dengan 6 pernyataan.

1. Kepuasan terhadap Kesungguhan Pegawai Sekretariat DPRD dalam Menyelesaikan Tugas
2. Kepuasan terhadap Sikap Tanggap dari Pegawai Sekretariat DPRD terhadap Kepentingan Anggot



3. Kepuasan terhadap Jawaban Pegawai Sekretariat DPRD atas Permasalahan/Persoalan DPRD dengan Tepat
4. Kepuasan terhadap Respon Pegawai Sekretariat DPRD atas Permintaan (perintah) Anggota DPRD
5. Kepuasan Terhadap Kesiapan Pegawai (selalu ada) pada saat dibutuhkan oleh Anggota DPR
6. Keramahan pegawai Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD

D. Empathy (aspek kepedulian) dengan 4 Pernyataan.

1. Kepuasan Anggota DPRD terhadap Perhatian yang diberikan Pegawai Sekretariat DPRD
2. Kepuasan Terhadap Kesabaran Pegawai Sekretariat DPRD dalam Memberikan Layanan
3. Kepuasan Anggota DPRD atas Kesediaan Pegawai Sekretariat DPRD untuk Memberikan Informasi yang dibutuhkan
4. Kepuasan Anggota DPRD atas Kesediaan Pegawai Sekretariat DPRD untuk Mengatasi Permasalahan/Persoalan/Keluhan

E. Assurance (aspek kepastian) dengan 5 pernyataan.

1. Kepuasan Anggota DPRD atas Kemampuan Pegawai Sekretariat DPRD dalam Memberikan Keyakinan dan Kepercayaan
2. Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Cepat, Akurat, Handal, dan Memuaskan yang diberikan Pegawa
3. Keramahan, Kesopanan, dan Kejujuran Pegawai Sekretariat DPRD dalam Memberikan Layanan kepada Anggota DPRD

Hasil survei terhadap Perceived Service (Pelayanan yang Diterima) dapat disimpulkan bahwa kepuasan Anggota DPRD Lampung Barat atas layanan Sekretariat DPRD Lampung Barat kepuasan tertinggi terdapat pada :



1. Kemudahan Anggota DPRD dalam menggunakan fasilitas yang ada di Sekretariat DPRD
2. Penampilan kerapian pegawai di Sekretariat DPRD
3. Kemampuan Pegawai dalam menggunakan teknologi informasi
4. Kepuasan anggota terhadap perhatian yang diberikan pegawai Sekretariat DPRD
5. Kepuasan anggota atas kesediaan pegawai Sekretariat DPRD untuk memberikan informasiinformasi yang dibutuhkan anggota DPRD
6. Kepuasan anggota atas kesediaan pegawai Sekretariat DPRD untuk mengatasi permasalahan /persoalan/keluhan Anggota DPRD.
7. Pengetahuan dan dedikasi pegawai Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sementara kepuasan terendah pada aspek Kebersihan gedung dan toilet Sekretariat DPRD dengan skor kepuasan hanya sebesar 2,74 atau 91,43%.

Dengan demikian secara keseluruhan hasil survei Perceived Service (Pelayanan yang Diterima) Anggota DPRD atas layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kualitas layanan yang diterima oleh anggota DPRD adalah memuaskan atau tidak terjadi kesenjangan.

Kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat sangatlah signifikan baik bagi penilaian kinerja Sekretariat DPRD maupun bagi peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Kinerja Sekretariat DPRD yang baik dan kepuasan anggota DPRD akan berdampak kepada kinerja DPRD, berikut adalah poin-poin urgensinya:



1. Optimalisasi Tiga Fungsi Utama DPRD

DPRD memiliki tiga fungsi krusial yang menentukan arah pembangunan, yaitu Legislasi (Pembuat Peraturan), Budgeting (Anggaran), dan Controling (Pengawasan). Dukungan teknis Sekretariat berupa pemberian pelayanan prima (seperti penyediaan data yang akurat, fasilitasi rapat yang efisien, dan kajian tenaga ahli) memastikan anggota dewan dapat mengambil keputusan pembangunan yang berbasis data (evidence-based policy). Dampak yang dihasilkan tanpa dukungan yang memuaskan, kualitas Peraturan Daerah (Perda) dan alokasi anggaran bisa menjadi tidak tepat sasaran bagi masyarakat.

2. Kelancaran Administrasi dan Legalitas

Pembangunan daerah membutuhkan dasar hukum dan administrasi yang kuat. Dalam penyusunan agenda kegiatan DPRD, ketidakpuasan sering muncul jika jadwal sidang atau administrasi surat-menjurut kurang baik. Hal ini bisa menghambat pengesahan anggaran pembangunan (APBD) yang sangat vital bagi pelayanan publik. Sekretariat bertugas menjaga agar seluruh kegiatan dewan tetap berada pada koridor hukum. Layanan yang buruk berisiko menimbulkan cacat prosedur dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

3. Jembatan Aspirasi Masyarakat

Sekretariat DPRD adalah pintu masuk utama bagi aspirasi masyarakat (melalui demo, audiensi, atau reses). Manajemen aspirasi harus dikelola dengan baik, jika pelayanan sekretariat DPRD dalam mengelola aspirasi ini memuaskan, maka suara rakyat akan tersalurkan dengan baik ke meja pembahasan dewan.

Urgensinya Kepuasan anggota dewan terhadap cara sekretariat memfasilitasi "turun ke lapangan" (reses) secara langsung berkorelasi



dengan seberapa banyak masalah riil di daerah yang bisa diselesaikan melalui program pembangunan.

4. Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan

Salah satu layanan sekretariat adalah pengelolaan administrasi keuangan anggota dewan. Pelayanan keuangan yang transparan dan tertib administrasi memungkinkan anggota DPRD fokus pada tugas pengawasan pembangunan tanpa terbebani masalah teknis pertanggungjawaban yang rumit.

Jika tingkat kepuasan rendah, hal ini biasanya mengindikasikan adanya hambatan birokrasi di internal Sekretariat yang dapat menyebabkan keterlambatan pengesahan anggaran, lemahnya pengawasan terhadap eksekutif, dan produk hukum yang tidak berkualitas. Ujung-ujungnya, masyarakatlah yang rugi karena pembangunan daerah menjadi terhambat.

Faktor pendukung terealisasinya sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut antara lain :

1. Adanya dukungan pendanaan kegiatan yang relatif besar.
2. Meningkatnya kemampuan dan kualitas aparatur Sekretariat DPRD sehingga meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur.
3. Meningkatnya pemahaman anggota DPRD terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD.

Namun disisi lain masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain :

1. Pelaksanaan Kegiatan Dewan yang tidak sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan Dewan yang telah ditetapkan. Sehingga



- terkadang fasilitasi Sekretariat DPRD terhadap kegiatan DPRD tersebut kurang maksimal.
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung kinerja DPRD.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah :

1. Memberikan pemahaman terhadap Anggota DPRD terkait dengan pelaksanaan kegiatan DPRD yang sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan penyampaian informasi kegiatan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan mendukung kinerja DPRD kepada masayarakat.
3. Meningkatkan kompetensi dan profesional aparatur Sekretariat DPRD.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat ditetapkan Peta Bisnis Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam melaksanakan hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antara bagian di dalam Sekretariat DPRD atau dengan perangkat daerah lain, dalam rangka mencapat tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan agar menghasilkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dalam menentukan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dilakukan melalui survei tingkat kepuasan yang melibatkan pihak ketiga dalam hal ini lembaga PUSHIBAN dari Universitas Lampung.

Peta Bisnis dalam menentukan survey kepuasan Anggota DPRD seperti tertuang pada gambar dibawah ini.



**Gambar 3
PETA BISNIS
KEGIATAN SURVEI KEPUASAN ANGGOTA DPRD**



C. Perbandingan Kinerja

1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan kinerja Sekretariat DPRD dari tahun 2022-2024, adalah tahun 2022 sebesar 100,00%, tahun 2023 terealisasi sebesar 100,02% dan tahun 2024 sebesar 100,02%, seperti pada tabel dibawah ini :



Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Tabel 10
Capaian Sasaran Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022-2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	BAIK 100%					
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Point		95,02 Point 100,02%	95,52 Point 100,02%	96,00 Point	97,29 Point	101,342 %



2. PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025 DENGAN SEKRETARIAT JENDRAL DPR RI

Sebagai Perangkat Daerah dan juga lembaga yang sama-sama memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada anggota DPR/DPRD, maka indikator kinerja utama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Sekretariat Jendral DPR RI memiliki kesamaan.

Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 terdapat satu Indikator Kinerja Utama yaitu Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan Target Kinerja 96,00 Point dengan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 97,29 Point Point atau terealisasi 101,34 %.

Sedangkan pada Sekretariat Jenderal DPR RI terdapat beberapa sasaran strategis yang salah satunya adalah **Terwujudnya Layanan Setjen DPR RI yang profesional, akuntabel dan modern untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang berkualitas melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal yang handal** dengan indikator kinerjanya adalah **Indeks Kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna layanan lainnya atas dukungan persidangan, administrasi dan keahlian serta pengawasan internal Sekretariat Jenderal DPR RI** dengan target kinerja 3,75. Namun sampai saat LKJiP Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini disusun, berdasarkan hasil pencarian belum terdapat informasi akurat terkait realisasi kinerja tersebut.

Pada dasarnya indeks penilaian terhadap kinerja Sekretariat DPR RI dan juga Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yang menunjukkan tingkat kepuasan anggota DPR/DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPR/DPRD.



3. PERBANDINGAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025 dengan SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG

Membandingkan pencapaian kinerja antara Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dari sisi Indikator Kinerja Utamanya tidak bisa dilaksanakan. Karena terdapat perbedaan indikator yang ditetapkan. Pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Indikator Kinerja Utama nya adalah Presentasi Peraturan Daerah (PERDA) yang ditetapkan dengan taget tahun 2025 sebesar 90%.

4. BENCHMARKING

Sebagai perangkat daerah pada tingkatan kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati. Namun dalam operasionalnya, Sekretariat DPRD sebagai lembaga yang melayani kebutuhan adminisitrasи Anggota DPRD Kabupaten, harus memiliki standar pelayanan yang baik. Sehingga anggota DPRD Kabupaten akan merasa puas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat DPRD yang berada didaerah dibandingkan dengan Sekretariat Jendral DPR RI yang menangani anggota DPR RI sama sama mengutamakan kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan dari Sekretariat DPRD. Dimana anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat sangat puas dengan pelayanan yang diberikan.

Baiknya pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat ini merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :



Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Tabel 11
Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE	KETERANGAN
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	23.705.025.205	23.545.454.494	98,93	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.554.600	200.798.950	99,13	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.227.330.141	3.083.126.207	95,53	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.857.000	8.857.000	100,00	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.970.000	198.742.100	99,89	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.244.424.300	2.220.715.865	98,94	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.207.100	332.598.805	90,33	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.191.950	505.201.898	95,29	
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.182.816.226	16.160.682.319	99,86	
9	Layanan Administrasi DPRD	836.438.000	834.731.350	99,80	



Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

B.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	15.179.393.100	15.128.786.003	99,67	
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	932.701.100	931.365.100	99,86	
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	106.055.000	106.055.000	100,00	
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	45.750.000	45.750.0000	100,00	
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	5.441.691.000	5.413.415.615	99,48	
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.017.441.000	1.012.701.000	99,53	
6	Pembahasan Kerja Sama Daerah	184.955.000	172.380.000	93,20	
7	Fasilitasi Tugas DPRD	7.450.800.000	7.447.119.288	99,95	
	JUMLAH	38.979.182.417	38.674.240.497	99,22	



Sekretariat DPRD pada tahun 2025, melaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 59 (Lima puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran belanja daerah Sekretariat DPRD Tahun 2025 setelah perubahan sebesar Rp.38.979.182.417,- (Tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) terealisasi sebesar Rp.38.674.240.497,- (Tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 99,22 % (Sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua persen).

Diagram 2
Perbandingan Target dan Serapan Anggaran Tahun 2025



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dengan penyerapan anggaran sebesar 99,22% realisasi kinerja berupa pencapaian sasaran Sekretariat DPRD mencapai 101,29%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 2,07%.



Efisiensi anggaran terlihat hampir semua kegiatan walau dalam jumlah yang relatif kecil. Namun ini menunjukkan bahwa untuk pencapaian pelaksanaan kegiatan tidak harus menghabiskan anggaran yang ada.

E. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini didapat dimanfaatkan sebagai :

1. Bahan evaluasi kinerja Perngkat daerah dan individu dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Bahan Laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah
3. Bahan Laporan kinerja dibuat untuk mempermudah manajemen dalam melakukan pengendalian intern, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara efisien dan bermanfaat pada kegiatan operasional perusahaan.
4. Laporan digunakan sebagai sumber informasi. Laporan dapat memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. Membantu penetapan kebijakan secara cepat. Meningkatkan perkembangan kegiatan di masa yang akan datang.
5. Laporan kinerja merupakan bukti dan wujud pertanggungjawaban atas hasil kinerja yang sudah dilakukan selama waktu yang sudah ditentukan.

E. Survey Kepuasan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat

Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD, maka dalam rangka penilaian terhadap kinerjanya, apakah pelayanan yang diberikan benar benar berkualitas dan memberikan efek kepuasan kepada yang dilayani dalam hal ini anggota DPRD. Maka perlu dilakukan survey terkait tingkat



kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Pelaksanaan survey kepuasan anggota DPRD ini melibatkan pihak ketiga dalam hal ini PUSIHBAN (Pusat Studi Hukum dan Pembangunan) UNIVERSITAS LAMPUNG yang melaksanakan survey dengan memberikan kuisioner kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat untuk dapat menjawab pertanyaan terkait survey. Yang hasilnya akan diolah dan menghasilkan **Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.**



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel.

Dari LKjIP Sekretariat DPRD Tahun 2025 tergambar bahwa Sekretariat DPRD mampu mencapai sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (point) dengan target kinerja 96,00 Point dan terealisasi 97,29 Point sehingga capaian kinerja sebesar 101,34%. Ini menggambarkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat telah sangat puas dengan kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Sekretariat DPRD pada tahun 2025, melaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 59 (Lima puluh sembilan) sub kegiatan dengan alokasi anggaran belanja daerah Sekretariat DPRD Tahun 2025 setelah perubahan sebesar Rp.38.979.182.417,- (Tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) terealisasi sebesar Rp.38.674.240.497,- (Tiga puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 99,22 % (Sembilan puluh sembilan koma dua puluh dua persen) dan terdapat SILPA sebesar Rp. 304.941.920,- (Tiga ratus empat juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dimana pencapaian sasaran



strategis melebihi target yang telah ditentukan dikarenakan ada beberapa faktor pendukung, antara lain adanya dukungan anggaran yang relatif besar dan dukungan dari anggota DPRD kabupaten Lampung Barat.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas terbatas;
- b. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD tidak sesuai dengan agenda / penjadwalan / tata kala kegiatan DPRD;
- c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.
- d. Sarana prasarana pendukung perlu diperbarui dan ditingkatkan secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja kedewanan.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Pelaksanaan Kegiatan Dewan yang tidak sesuai dengan Rencana Program dan Kegiatan Dewan yang telah ditetapkan. Sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan agenda sehingga terkadang pelaksanaan kegiatan berjalan dengan terburu buru dan kurang terlaksana dengan baik.
2. Belum optimalnya pemanfaatan IT untuk meningkatkan pelayanan terhadap Anggota dan Pimpinan DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Solusi

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, telah dilakukan beberapa langkah antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD terkait dengan pelaksanaan kegiatan DPRD.



2. Meningkatkan koordinasi masing-masing Bagian yang mengelola kegiatan, agar dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kegiatan agar dapat dilakukan dengan baik, benar dan tepat waktu. Sehingga diharapkan program dan kegiatan yang telah dianggarkan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Meningkatkan penggunaan IT dalam rangka memberikan pelayanan terhadap Anggota DPRD.
4. Mengoptimalkan waktu kerja dan melaksanakan pengawasan secara melekat dan berjenjang

Lampiran I

Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabupaten DPRD
Periode 2023-2026
Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	-	Tinggi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	0	0	0	96,00	Sekretaris DPRD

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



PRWAN, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690310 199803 1 006

Rencana Aksi Tingkat Program Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat
Periode 2023-2026
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan		Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Akumulatif	Keuangan Per triwulan	
					Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	SAKIP Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	Trw 1 = 80,75 Point	Trw 1 = Rp. 6.715.487.770	KABAG UMUM DAN KEHUMASAN, KABAG KEUANGAN DAN KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
					Trw 2 = 80,75 Point	Trw 2 = Rp. 13.685.121.764	
					Trw 3 = 80,75 Point	Trw 3 = Rp. 18.714.153.989	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Dukungan Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Trw 4 = 80,75 Point	Trw 4 = Rp. 24.021.366.780	
					Trw 1 = 50,41 %	Trw 1 = Rp. 5.270.456.400	KABAG UMUM DAN KEHUMASAN, KABAG KEUANGAN DAN KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
					Trw 2 = 81,51 %	Trw 2 = Rp. 11.106.033.400	
					Trw 3 = 98,19 %	Trw 3 = Rp. 13.554.593.900	
	Terlaksananya Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	Terlaksananya Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	Trw 4 = 100,00 %	Trw 4 = Rp. 14.388.578.100	
					Trw 1 = 59,72 %	Trw 1 = Rp. 1.651.376.000	KABAG UMUM DAN KEHUMASAN, KABAG KEUANGAN DAN KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
					Trw 2 = 60,99 %	Trw 2 = Rp. 1.720.457.000	

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN LAMPUNG BARAT



PIK WAN, SE., MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690310 199803 1 006

Lampiran III

Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Periode 2023-2026

Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab	
						Target	Target		
						7	8		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Program Penunjang Penganggaran, dan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Perencaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Trw 1 = 4 Dokumen Trw 2 = 6 Dokumen Trw 3 = 10 Dokumen Trw 4 = 11 Dokumen	Trw 1 = Rp. 37.558.200 Trw 2 = Rp. 47.820.200 Trw 3 = Rp. 51.075.200 Trw 4 = Rp. 53.130.200	PERENCANA AHLI MUDA	
					Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Trw 1 = 1 Dokumen Trw 2 = 1 Dokumen Trw 3 = 2 Dokumen Trw 4 = 5 Dokumen	PERENCANA AHLI MUDA	
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 5 Dokumen Trw 2 = 7 Dokumen Trw 3 = 9 Dokumen Trw 4 = 13 Dokumen	PERENCANA AHLI MUDA	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Trw 1 = 35 Orang Trw 2 = 35 Orang Trw 3 = 35 Orang Trw 4 = 35 Orang	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	
					Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Keuangan SKPD	Trw 1 = 3 Dokumen Trw 2 = 6 Dokumen Trw 3 = 9 Dokumen Trw 4 = 12 Dokumen	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
					Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = - Laporan Trw 2 = - Laporan Trw 3 = - Laporan Trw 4 = 1 Laporan	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
					Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	Trw 1 = 1 Dokumen Trw 2 = 1 Dokumen	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Trw 3 = 2 Dokumen	Trw 3 = 19.953.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
						Trw 4 = 3 Dokumen	Trw 4 = 22.748.000	
						Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. 4.320.000	
						Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = Rp. 6.375.000	
						Trw 3 = 2 Dokumen	Trw 3 = Rp. 8.545.000	
						Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = Rp. 12.900.000	
						Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
						Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp. 3.063.600	
						Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 9.090.800	
						Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 12.104.400	
						Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. 9.089.500	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp. 10.572.000	
						Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 10.572.000	
						Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 10.572.000	
						Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = Rp. 510.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 6 Dokumen	Trw 2 = Rp. 3.792.500	
						Trw 3 = 6 Dokumen	Trw 3 = Rp. 5.585.000	
						Trw 4 = 6 Dokumen	Trw 4 = Rp. 7.377.500	
						Trw 1 = 12 Orang	Trw 1 = Rp. 141.177.900	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
						Trw 2 = 12 Orang	Trw 2 = Rp. 206.900.000	
						Trw 3 = 12 Orang	Trw 3 = Rp. 206.900.000	
						Trw 4 = 12 Orang	Trw 4 = Rp. 206.900.000	
						Trw 1 = 2 Paket	Trw 1 = Rp. 1.850.300	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 5 Paket	Trw 2 = Rp. 206.923.500	
						Trw 3 = 9 Paket	Trw 3 = Rp. 216.026.400	
						Trw 4 = 13 Paket	Trw 4 = Rp. 220.496.400	
						Trw 1 = 2 Paket	Trw 1 = Rp. 21.735.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 2 Paket	Trw 2 = Rp. 204.235.000	
						Trw 3 = 2 Paket	Trw 3 = Rp. 204.235.000	
						Trw 4 = 2 Paket	Trw 4 = Rp. 204.235.000	
						Trw 1 = - Paket	Trw 1 = Rp. -	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 7 Paket	Trw 2 = Rp. 331.408.700	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Trw 3 = 7 Paket	Trw 3 = Rp. 331.408.700	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 4 = 7 Paket	Trw 4 = Rp. 331.408.700	
						Trw 1 = 2 Paket	Trw 1 = Rp. 6.720.000	
						Trw 2 = 2 Paket	Trw 2 = Rp. 13.940.000	
						Trw 3 = 2 Paket	Trw 3 = Rp. 21.660.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 4 = 2 Paket	Trw 4 = Rp. 29.250.000	
						Trw 1 = 10 Paket	Trw 1 = Rp. 157.355.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 16 Paket	Trw 2 = Rp. 219.110.400	
						Trw 3 = 20 Paket	Trw 3 = Rp. 249.815.400	
						Trw 4 = 25 Paket	Trw 4 = Rp. 293.475.400	
						Trw 1 = 90 Dokumen	Trw 1 = Rp. 334.795.000	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI
						Trw 2 = 90 Dokumen	Trw 2 = Rp. 669.525.000	
						Trw 3 = 90 Dokumen	Trw 3 = Rp. 1.014.670.000	
						Trw 4 = 90 Dokumen	Trw 4 = Rp. 1.349.400.000	
						Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp. 18.580.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp. 46.052.000	
						Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp. 74.336.000	
						Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp. 102.750.000	
						Trw 1 = 8 Laporan	Trw 1 = Rp. 109.421.400	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 10 Laporan	Trw 2 = Rp. 172.750.800	
						Trw 3 = 12 Laporan	Trw 3 = Rp. 172.750.800	
						Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp. 172.750.800	
						Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp. 2.900.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp. 5.800.000	
						Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp. 6.700.000	
						Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp. 7.000.000	
						Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp. 58.900.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp. 105.275.000	
						Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp. 149.975.000	
						Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp. 185.750.000	
						Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp. 44.894.800	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp. 94.963.800	
						Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp. 140.244.300	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan	Keuangan Per triwulan	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Akumulatif	Akumulatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp. 177.704.300	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 1 = 0 Unit	Trw 1 = Rp. -	
						Trw 2 = 0 Unit	Trw 2 = Rp. -	
						Trw 3 = 0 Unit	Trw 3 = Rp. -	
						Trw 4 = 0 Unit	Trw 4 = Rp. -	
						Trw 1 = 22 Unit	Trw 1 = Rp. 139.175.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 22 Unit	Trw 2 = Rp. 208.350.000	
						Trw 3 = 22 Unit	Trw 3 = Rp. 256.275.000	
						Trw 4 = 22 Unit	Trw 4 = Rp. 301.200.000	
						Trw 1 = 20 Unit	Trw 1 = Rp. 2.700.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 50 Unit	Trw 2 = Rp. 10.900.000	
						Trw 3 = 69 Unit	Trw 3 = Rp. 18.300.000	
						Trw 4 = 69 Unit	Trw 4 = Rp. 21.500.000	
						Trw 1 = 8 Unit	Trw 1 = Rp. 22.335.188	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 20 Unit	Trw 2 = Rp. 51.970.376	
						Trw 3 = 28 Unit	Trw 3 = Rp. 75.130.064	
						Trw 4 = 33 Unit	Trw 4 = Rp. 93.741.620	
						Trw 1 = 1 Unit	Trw 1 = Rp. 15.749.950	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 3 Unit	Trw 2 = Rp. 106.288.030	
						Trw 3 = 4 Unit	Trw 3 = Rp. 131.906.430	
						Trw 4 = 5 Unit	Trw 4 = Rp. 151.090.330	
						Trw 1 = 35 Orang	Trw 1 = Rp. 3.839.721.998	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
						Trw 2 = 35 Orang	Trw 2 = Rp. 7.676.293.996	
						Trw 3 = 35 Orang	Trw 3 = Rp. 11.131.412.194	
						Trw 4 = 35 Orang	Trw 4 = Rp. 14.809.960.392	
						Trw 1 = 0 Paket	Trw 1 = Rp. 474.500.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 0 Paket	Trw 2 = Rp. 474.500.000	
						Trw 3 = 6 Paket	Trw 3 = Rp. 474.500.000	
						Trw 4 = 6 Paket	Trw 4 = Rp. 474.500.000	
						Trw 1 = 35 Orang	Trw 1 = Rp. -	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 35 Orang	Trw 2 = Rp. 373.325.000	
						Trw 3 = 35 Orang	Trw 3 = Rp. 373.325.000	
						Trw 4 = 35 Orang	Trw 4 = Rp. 373.325.000	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab	
						Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 2 Dokumen Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 1 = Rp. 66.360.000 Trw 2 = Rp. 66.360.000 Trw 3 = Rp. 66.360.000 Trw 4 = Rp. 66.360.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = Rp. 43.603.400 Trw 2 = Rp. 78.991.600 Trw 3 = Rp. 113.990.800 Trw 4 = Rp. 148.765.000	
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Trw 1 = 3 Paket Trw 2 = 3 Paket Trw 3 = 3 Paket Trw 4 = 3 Paket	Trw 1 = Rp. 198.000.000 Trw 2 = Rp. 396.000.000 Trw 3 = Rp. 594.000.000 Trw 4 = Rp. 792.000.000	
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. - Trw 2 = Rp. 7.534.000 Trw 3 = Rp. 7.534.000 Trw 4 = Rp. 15.101.000	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Trw 1 = 2 Dokumen Trw 2 = 4 Dokumen Trw 3 = 5 Dokumen Trw 4 = 7 Dokumen	Trw 1 = Rp. 23.287.900 Trw 2 = Rp. 422.233.900 Trw 3 = Rp. 797.869.400 Trw 4 = Rp. 842.948.500	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 2 Dokumen Trw 3 = 2 Dokumen Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 1 = Rp. 624.774.000 Trw 2 = Rp. 818.953.000 Trw 3 = Rp. 818.953.000 Trw 4 = Rp. 818.953.000	
						Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. - Trw 2 = Rp. - Trw 3 = Rp. - Trw 4 = Rp. -	
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 1 Dokumen Trw 3 = 1 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. - Trw 2 = Rp. 49.482.500 Trw 3 = Rp. 49.482.500 Trw 4 = Rp. 49.482.500	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan	Keuangan Per triwulan	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Akumulatif	Akumulatif	
						Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KUA dan Perubahan PPAS	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. -	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Terlaksananya Pembahasan APBD		Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 49.482.500	
				Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan		Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 49.482.500	
				Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp. -	
				Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Hukum		Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 76.760.000	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat		Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 76.760.000	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp. 30.544.600	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Peningkatan Kapasitas DPRD		Trw 2 = 4 Laporan	Trw 2 = Rp. 64.618.200	
				Terlaksananya Orientasi DPRD		Trw 3 = 5 Laporan	Trw 3 = Rp. 68.668.200	
				Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD		Trw 4 = 5 Laporan	Trw 4 = Rp. 98.965.400	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp. 33.631.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
						Trw 2 = 4 Laporan	Trw 2 = Rp. 70.671.000	
						Trw 3 = 5 Laporan	Trw 3 = Rp. 74.721.000	
						Trw 4 = 5 Laporan	Trw 4 = Rp. 108.071.000	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp. 32.793.400	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
						Trw 2 = 4 Laporan	Trw 2 = Rp. 69.026.800	
						Trw 3 = 5 Laporan	Trw 3 = Rp. 73.076.800	
						Trw 4 = 5 Laporan	Trw 4 = Rp. 105.544.200	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
						Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. -	
						Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp. -	
						Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 4 = Rp. -	
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = Rp. 1.034.235.000	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI
						Trw 2 = 3 Dokumen	Trw 2 = Rp. 2.013.941.000	
						Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = Rp. 2.472.111.000	
						Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = Rp. 2.995.510.000	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						Trw 1 = 6 Orang	Trw 1 = Rp. 57.303.000	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
						Trw 2 = 6 Orang	Trw 2 = Rp. 114.606.000		
						Trw 3 = 6 Orang	Trw 3 = Rp. 171.921.000		
						Trw 4 = 6 Orang	Trw 4 = Rp. 228.031.000		
						Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. 42.920.000	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI	
						Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. 42.920.000		
						Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 42.920.000		
						Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 42.920.000		
						Trw 1 = 6 Dokumen	Trw 1 = Rp. 1.480.148.000	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI	
						Trw 2 = 6 Dokumen	Trw 2 = Rp. 1.480.148.000		
						Trw 3 = 12 Dokumen	Trw 3 = Rp. 2.871.559.000		
						Trw 4 = 12 Dokumen	Trw 4 = Rp. 2.871.559.000		
						Trw 1 = 0 Laporan	Trw 1 = Rp. 106.009.000	KASUBBAG PROTOKOL	
						Trw 2 = 3 Laporan	Trw 2 = Rp. 177.300.000		
						Trw 3 = 3 Laporan	Trw 3 = Rp. 177.300.000		
						Trw 4 = 3 Laporan	Trw 4 = Rp. 177.300.000		
						Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. 9.287.000	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
						Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp. 9.287.000		
						Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 9.287.000		
						Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 9.287.000		
						Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = Rp. 855.772.000	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
						Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = Rp. 1.711.467.000		
						Trw 3 = 2 Dokumen	Trw 3 = Rp. 1.711.467.000		
						Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = Rp. 1.711.467.000		
						Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI	
						Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. -		
						Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp. -		
						Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 4 = Rp. -		
						Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = Rp. 171.228.000	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI	
						Trw 2 = 4 Dokumen	Trw 2 = Rp. 240.309.000		
						Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = Rp. 335.622.000		
						Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = Rp. 366.942.000		
						Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = Rp. 1.092.174.400	ANALIS KEBIJAKAN AHIJ MUDA	

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Pelaksanaan Tugas DPRD	Trw 2 = 5 Dokumen Trw 3 = 7 Dokumen Trw 4 = 7 Dokumen	Trw 2 = Rp. 2.658.571.200 Trw 3 = Rp. 3.552.748.000 Trw 4 = Rp. 3.552.748.000	
				Tersusunnya Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Trw 1 = 0 Laporan Trw 2 = 0 Laporan Trw 3 = 0 Laporan Trw 4 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp. - Trw 2 = Rp. - Trw 3 = Rp. - Trw 4 = Rp. 42.712.000	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Trw 1 = 4 Dokumen Trw 2 = 7 Dokumen Trw 3 = 13 Dokumen Trw 4 = 16 Dokumen	Trw 1 = Rp. 45.336.500 Trw 2 = Rp. 47.627.000 Trw 3 = Rp. 133.955.500 Trw 4 = Rp. 136.107.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Terlaksananya Fasilitasi Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Trw 1 = 6 Dokumen Trw 2 = 8 Dokumen Trw 3 = 8 Dokumen Trw 4 = 8 Dokumen	Trw 1 = Rp. 1.282.388.600 Trw 2 = Rp. 2.751.034.800 Trw 3 = Rp. 3.151.168.000 Trw 4 = Rp. 3.173.668.000	PRANATA HUMAS

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN LAMPUNG BARAT



PIKMAN, SE., MM
PILMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690310 199803 1 006

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif	Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Lampiran IV

Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Periode 2023 - 2026

Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target	Target	Target	
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = Rp. 37.558.200	PERENCANA AHLI MUDA	PERENCANA AHLI MUDA	
							Trw 2 = 6 Dokumen	Trw 2 = Rp. 47.820.200			
							Trw 3 = 10 Dokumen	Trw 3 = Rp. 51.075.200			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. 5.073.400	Trw 1 = Rp. 5.073.400	PERENCANA AHLI MUDA	PERENCANA AHLI MUDA	
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp. 5.073.400			
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Trw 1 = - Dokumen	Trw 1 = Rp. -	Trw 1 = Rp. -	PERENCANA AHLI MUDA	PERENCANA AHLI MUDA	
							Trw 2 = - Dokumen	Trw 2 = Rp. 5.839.500			
			Koordinasi dan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Trw 1 = - Dokumen	Trw 1 = Rp. 3.932.200	Trw 1 = Rp. 3.932.200	PERENCANA AHLI MUDA	PERENCANA AHLI MUDA	
							Trw 2 = - Dokumen	Trw 2 = Rp. 3.932.200			
			Koordinasi dan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Trw 1 = - Dokumen	Trw 1 = Rp. -	Trw 1 = Rp. -	PERENCANA AHLI MUDA	PERENCANA AHLI MUDA	
							Trw 2 = - Dokumen	Trw 2 = Rp. -			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. 3.806.800	Trw 1 = Rp. 3.806.800	PERENCANA AHLI MUDA	PERENCANA AHLI MUDA	
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp. 7.608.600			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 5 Dokumen	Trw 1 = Rp. 5.305.000	Trw 1 = Rp. 5.305.000	PERENCANA AHLI MUDA	PERENCANA AHLI MUDA	
							Trw 2 = 7 Dokumen	Trw 2 = Rp. 14.850.000			
							Trw 3 = 9 Dokumen	Trw 3 = Rp. 16.885.000			
							Trw 4 = 13 Dokumen	Trw 4 = Rp. 101.000.000			

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target	Target	Target	
							Trw 1 = 35 Orang	Trw 1 = Rp. 927.047.734	Trw 1 = Rp. 927.047.734	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	
							Trw 2 = 35 Orang	Trw 2 = Rp. 1.830.470.462	Trw 2 = Rp. 1.830.470.462		
							Trw 3 = 35 Orang	Trw 3 = Rp. 2.508.037.501	Trw 3 = Rp. 2.508.037.501		
							Trw 4 = 35 Orang	Trw 4 = Rp. 3.185.604.538	Trw 4 = Rp. 3.185.604.538		
							Trw 1 = 3 Dokumen	Trw 1 = Rp. 4.330.000	Trw 1 = Rp. 4.330.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
							Trw 2 = 6 Dokumen	Trw 2 = Rp. 6.535.000	Trw 2 = Rp. 6.535.000		
							Trw 3 = 9 Dokumen	Trw 3 = Rp. 8.755.000	Trw 3 = Rp. 8.755.000		
							Trw 4 = 12 Dokumen	Trw 4 = Rp. 10.900.200	Trw 4 = Rp. 10.900.200		
							Trw 1 = - Laporan	Trw 1 = Rp. -	Trw 1 = Rp. -	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
							Trw 2 = - Laporan	Trw 2 = Rp. -	Trw 2 = Rp. -		
							Trw 3 = - Laporan	Trw 3 = Rp. -	Trw 3 = Rp. -		
							Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp. 12.131.800	Trw 4 = Rp. 12.131.800		
							Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. 14.040.000	Trw 1 = Rp. 14.040.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp. 17.163.000	Trw 2 = Rp. 17.163.000		
							Trw 3 = 2 Dokumen	Trw 3 = Rp. 19.953.000	Trw 3 = Rp. 19.953.000		
							Trw 4 = 3 Dokumen	Trw 4 = Rp. 22.748.000	Trw 4 = Rp. 22.748.000		
							Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. 4.320.000	Trw 1 = Rp. 4.320.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
							Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = Rp. 6.375.000	Trw 2 = Rp. 6.375.000		
							Trw 3 = 2 Dokumen	Trw 3 = Rp. 8.545.000	Trw 3 = Rp. 8.545.000		
							Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = Rp. 12.900.000	Trw 4 = Rp. 12.900.000		
							Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -	Trw 1 = Rp. -	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp. 3.063.600	Trw 2 = Rp. 3.063.600		
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 9.090.800	Trw 3 = Rp. 9.090.800		
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 12.104.400	Trw 4 = Rp. 12.104.400		
							Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. 9.089.500	Trw 1 = Rp. 9.089.500	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp. 10.572.000	Trw 2 = Rp. 10.572.000		
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 10.572.000	Trw 3 = Rp. 10.572.000		
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 10.572.000	Trw 4 = Rp. 10.572.000		
							Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = Rp. 510.000	Trw 1 = Rp. 510.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
							Trw 2 = 6 Dokumen	Trw 2 = Rp. 3.792.500	Trw 2 = Rp. 3.792.500		
							Trw 3 = 6 Dokumen	Trw 3 = Rp. 5.585.000	Trw 3 = Rp. 5.585.000		
							Trw 4 = 6 Dokumen	Trw 4 = Rp. 7.377.500	Trw 4 = Rp. 7.377.500		
							Trw 1 = 12 Orang	Trw 1 = Rp. 141.177.900	Trw 1 = Rp. 141.177.900	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
							Trw 2 = 12 Orang	Trw 2 = Rp. 206.900.000	Trw 2 = Rp. 206.900.000		
							Trw 3 = 12 Orang	Trw 3 = Rp. 206.900.000	Trw 3 = Rp. 206.900.000		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target		
							Trw 4 = 12 Orang	Trw 4 = Rp. 206.900.000		
							Trw 1 = 2 Paket	Trw 1 = Rp. 1.850.300		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 5 Paket	Trw 2 = Rp. 206.923.500		
							Trw 3 = 9 Paket	Trw 3 = Rp. 216.026.400		
							Trw 4 = 13 Paket	Trw 4 = Rp. 220.496.400		
							Trw 1 = 2 Paket	Trw 1 = Rp. 21.735.000		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 2 Paket	Trw 2 = Rp. 204.235.000		
							Trw 3 = 2 Paket	Trw 3 = Rp. 204.235.000		
							Trw 4 = 2 Paket	Trw 4 = Rp. 204.235.000		
							Trw 1 = -Paket	Trw 1 = Rp. -		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 7 Paket	Trw 2 = Rp. 331.408.700		
							Trw 3 = 7 Paket	Trw 3 = Rp. 331.408.700		
							Trw 4 = 7 Paket	Trw 4 = Rp. 331.408.700		
							Trw 1 = 2 Paket	Trw 1 = Rp. 6.720.000		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 2 Paket	Trw 2 = Rp. 13.940.000		
							Trw 3 = 2 Paket	Trw 3 = Rp. 21.660.000		
							Trw 4 = 2 Paket	Trw 4 = Rp. 29.250.000		
							Trw 1 = 10 Paket	Trw 1 = Rp. 157.355.000		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 16 Paket	Trw 2 = Rp. 219.110.400		
							Trw 3 = 20 Paket	Trw 3 = Rp. 249.815.400		
							Trw 4 = 25 Paket	Trw 4 = Rp. 293.475.400		
							Trw 1 = 90 Dokumen	Trw 1 = Rp. 334.795.000		KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI
							Trw 2 = 90 Dokumen	Trw 2 = Rp. 669.525.000		
							Trw 3 = 90 Dokumen	Trw 3 = Rp. 1.014.670.000		
							Trw 4 = 90 Dokumen	Trw 4 = Rp. 1.349.400.000		
							Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp. 18.580.000		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp. 46.052.000		
							Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp. 74.336.000		
							Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp. 102.750.000		
							Trw 1 = 8 Laporan	Trw 1 = Rp. 109.421.400		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 10 Laporan	Trw 2 = Rp. 172.750.800		
							Trw 3 = 12 Laporan	Trw 3 = Rp. 172.750.800		
							Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp. 172.750.800		
							Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp. 2.900.000		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp. 5.800.000		
							Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp. 6.700.000		
							Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp. 7.000.000		
							Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp. 58.900.000		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp. 105.275.000		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target		
						Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp. 149.975.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
							Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp. 185.750.000		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp. 44.894.800		
							Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp. 94.963.800		
							Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp. 140.244.300		
							Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp. 177.704.300		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Trw 1 = 0 Unit	Trw 1 = Rp. -	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
							Trw 2 = 0 Unit	Trw 2 = Rp. -		
							Trw 3 = 0 Unit	Trw 3 = Rp. -		
							Trw 4 = 0 Unit	Trw 4 = Rp. -		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Trw 1 = 22 Unit	Trw 1 = Rp. 139.175.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
							Trw 2 = 22 Unit	Trw 2 = Rp. 208.350.000		
							Trw 3 = 22 Unit	Trw 3 = Rp. 256.275.000		
							Trw 4 = 22 Unit	Trw 4 = Rp. 301.200.000		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Trw 1 = 20 Unit	Trw 1 = Rp. 2.700.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
							Trw 2 = 50 Unit	Trw 2 = Rp. 10.900.000		
							Trw 3 = 69 Unit	Trw 3 = Rp. 18.300.000		
							Trw 4 = 69 Unit	Trw 4 = Rp. 21.500.000		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Trw 1 = 8 Unit	Trw 1 = Rp. 22.335.188	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
							Trw 2 = 20 Unit	Trw 2 = Rp. 51.970.376		
							Trw 3 = 28 Unit	Trw 3 = Rp. 75.130.064		
							Trw 4 = 33 Unit	Trw 4 = Rp. 93.741.620		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Trw 1 = 1 Unit	Trw 1 = Rp. 15.749.950	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
							Trw 2 = 3 Unit	Trw 2 = Rp. 106.288.030		
							Trw 3 = 4 Unit	Trw 3 = Rp. 131.906.430		
							Trw 4 = 5 Unit	Trw 4 = Rp. 151.090.330		
						Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Trw 1 = 35 Orang	Trw 1 = Rp. 3.839.721.998	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	
							Trw 2 = 35 Orang	Trw 2 = Rp. 7.676.293.996		
							Trw 3 = 35 Orang	Trw 3 = Rp. 11.131.412.194		
							Trw 4 = 35 Orang	Trw 4 = Rp. 14.809.960.392		
						Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Trw 1 = 4 Paket	Trw 1 = Rp. 474.500.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
							Trw 2 = 4 Paket	Trw 2 = Rp. 474.500.000		
							Trw 3 = 4 Paket	Trw 3 = Rp. 474.500.000		
							Trw 4 = 4 Paket	Trw 4 = Rp. 474.500.000		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Trw 1 = - Orang	Trw 1 = Rp. -	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
							Trw 2 = 35 Orang	Trw 2 = Rp. 373.325.000		
							Trw 3 = 35 Orang	Trw 3 = Rp. 373.325.000		
							Trw 4 = 35 Orang	Trw 4 = Rp. 373.325.000		
Layanan Administrasi	Penyelenggaraan Administrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	Trw 1 = 35 Dokumen	Trw 1 = Rp. 66.360.000	ANALIS KEBIJAKAN AHTI MUDA				

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target		
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Keanggotaan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Administrasi Keanggotaan DPRD	Trw 2 = 35 Dokumen	Trw 2 = Rp. 66.360.000		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
						Trw 3 = 35 Dokumen	Trw 3 = Rp. 66.360.000			
						Trw 4 = 35 Dokumen	Trw 4 = Rp. 66.360.000			
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp. 43.603.400		KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
						Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp. 78.991.600			
						Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp. 113.990.800			
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp. 148.765.000		PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
						Trw 1 = 3 Paket	Trw 1 = Rp. 198.000.000			
						Trw 2 = 3 Paket	Trw 2 = Rp. 396.000.000			
			Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Peraturan Daerah	Trw 3 = 3 Paket	Trw 3 = Rp. 594.000.000		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
						Trw 4 = 3 Paket	Trw 4 = Rp. 792.000.000			
						Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -			
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. 7.534.000		PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
						Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp. 7.534.000			
						Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 15.101.000			
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik yang Difasilitasi	Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = Rp. 23.287.900		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
						Trw 2 = 4 Dokumen	Trw 2 = Rp. 422.233.900			
						Trw 3 = 5 Dokumen	Trw 3 = Rp. 797.869.400			
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Trw 4 = 7 Dokumen	Trw 4 = Rp. 842.948.500		PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
						Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -			
						Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. -			
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp. -		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
						Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 4 = Rp. -			
						Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -			
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. -		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
						Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 49.482.500			
						Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 49.482.500			
			Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -		ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
						Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. -			
						Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 38.409.000			

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target		
				Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. -		
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 76.760.000		
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 76.760.000		
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp. 76.760.000		
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 76.760.000		
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 76.760.000		
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp. 30.544.600	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
							Trw 2 = 4 Laporan	Trw 2 = Rp. 64.618.200		
							Trw 3 = 5 Laporan	Trw 3 = Rp. 68.668.200		
							Trw 4 = 5 Laporan	Trw 4 = Rp. 98.965.400		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp. 33.631.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
							Trw 2 = 4 Laporan	Trw 2 = Rp. 70.671.000		
							Trw 3 = 5 Laporan	Trw 3 = Rp. 74.721.000		
							Trw 4 = 5 Laporan	Trw 4 = Rp. 108.071.000		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp. 32.793.400	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
							Trw 2 = 4 Laporan	Trw 2 = Rp. 69.026.800		
							Trw 3 = 5 Laporan	Trw 3 = Rp. 73.076.800		
							Trw 4 = 5 Laporan	Trw 4 = Rp. 105.544.200		
	Peningkatan Kapasitas DPRD	Orientasi DPRD	Terlaksananya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
					Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. -				
					Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp. -				
					Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 4 = Rp. -				
		Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = Rp. 1.034.235.000	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
					Trw 2 = 3 Dokumen	Trw 2 = Rp. 2.013.941.000				
					Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = Rp. 2.472.111.000				
					Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = Rp. 2.995.510.000				
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Trw 1 = 6 Orang	Trw 1 = Rp. 57.303.000	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
					Trw 2 = 6 Orang	Trw 2 = Rp. 114.606.000				
					Trw 3 = 6 Orang	Trw 3 = Rp. 171.921.000				
					Trw 4 = 6 Orang	Trw 4 = Rp. 228.031.000				
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. 42.920.000	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI			
					Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp. 42.920.000				
					Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 42.920.000				
					Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 42.920.000				
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Penyebarluasan Dituduh Mihum Daerah Dihilangkan	Jumlah Dokumen Hasil Penyebarluasan Dituduh Mihum Daerah Dihilangkan	Trw 1 = 6 Dokumen	Trw 1 = Rp. 1.480.148.000	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI			

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target		
							Trw 2 = 6 Dokumen	Trw 2 = Rp. 1.480.148.000		
							Trw 3 = 12 Dokumen	Trw 3 = Rp. 2.871.559.000		
							Trw 4 = 12 Dokumen	Trw 4 = Rp. 2.871.559.000		
							Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp. 106.009.000	KASUBBAG PROTOKOL	DILIHKO DOKUMENTASI
							Trw 2 = 3 Laporan	Trw 2 = Rp. 177.300.000		
							Trw 3 = 3 Laporan	Trw 3 = Rp. 177.300.000		
							Trw 4 = 3 Laporan	Trw 4 = Rp. 177.300.000		
							Trw 1 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp. 9.287.000	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp. 9.287.000		
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp. 9.287.000		
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp. 9.287.000		
							Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = Rp. 855.772.000	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
							Trw 2 = 2 Dokumen	Trw 2 = Rp. 1.711.467.000		
							Trw 3 = 2 Dokumen	Trw 3 = Rp. 1.711.467.000		
							Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 4 = Rp. 1.711.467.000		
							Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = Rp. -	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = Rp. -		
							Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = Rp. -		
							Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 4 = Rp. -		
							Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = Rp. 171.228.000	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI
							Trw 2 = 4 Dokumen	Trw 2 = Rp. 240.309.000		
							Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = Rp. 335.622.000		
							Trw 4 = 4 Dokumen	Trw 4 = Rp. 366.942.000		
							Trw 1 = 2 Dokumen	Trw 1 = Rp. 1.092.174.400	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
							Trw 2 = 5 Dokumen	Trw 2 = Rp. 2.658.571.200		
							Trw 3 = 7 Dokumen	Trw 3 = Rp. 3.552.748.000		
							Trw 4 = 7 Dokumen	Trw 4 = Rp. 3.552.748.000		
							Trw 1 = 0 Laporan	Trw 1 = Rp. -	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
							Trw 2 = 0 Laporan	Trw 2 = Rp. -		
							Trw 3 = 0 Laporan	Trw 3 = Rp. -		
							Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp. 42.712.000		
							Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = Rp. 45.336.500	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
							Trw 2 = 7 Dokumen	Trw 2 = Rp. 47.627.000		
							Trw 3 = 13 Dokumen	Trw 3 = Rp. 133.955.500		
							Trw 4 = 16 Dokumen	Trw 4 = Rp. 136.107.000		
							Trw 1 = 6 Dokumen	Trw 1 = Rp. 1.282.388.600	PRANATA HUMAS	
							Trw 2 = 8 Dokumen	Trw 2 = Rp. 2.751.034.800		
							Trw 3 = 8 Dokumen	Trw 3 = Rp. 3.151.168.000		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif	Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Target		
							Trw 4 =	8 Dokumen		
							Trw 4 =	8 Dokumen	Trw 4 = Rp. 3.173.668.000	

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN LAMPUNG BARAT



LAMPUNG BARAT

PIPAN, SE., MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690310 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PIRWAN, SE., MM**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **PAROSIL MABSUS**
Jabatan : Bupati Lampung Barat

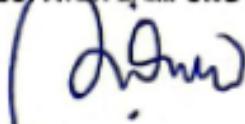
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025


BUPATI LAMPUNG BARAT,
PAROSIL MABSUS


SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
PIRWAN, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690310 199803 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	96.00

Program	:	Anggaran
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	:	24,021,366,780
2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	:	17,627,079,300
Jumlah Anggaran	:	41,648,446,080

Liwa, 24 Februari 2025



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

PIRWAN, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690310 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. AGUS SETIAWAN, S.E., MM**
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **PIRWAN, SE., M.M**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

PIRWAN, SE., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690310 199803 1 006

Pihak Pertama,

M. AGUS SETIAWAN, S.E., MM
PEMBINA
NIP. 19830817 200804 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	80.75
2	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00%

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	215,125,000	APBD
1 Layanan Administrasi DPRD	215,125,000	APBD
1 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	66,360,000	APBD
2 Fasilitasi Fraksi DPRD	148,765,000	APBD
2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10,994,690,100	APBD
1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1,677,002,500	APBD
1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15,101,000	APBD
2 Pembahasan Rancangan Perda	842,948,500	APBD
3 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	818,953,000	APBD
2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	329,245,000	APBD
1 Pembahasan KUA dan PPAS	49,482,500	APBD
2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	49,482,500	APBD
3 Pembahasan APBD	76,760,000	APBD
4 Pembahasan APBD Perubahan	76,760,000	APBD

5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	:	76,760,000	APBD
3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	:	312,580,600	APBD
1 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	:	98,965,400	APBD
2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	:	108,071,000	APBD
3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	:	105,544,200	APBD
4 Peningkatan Kapasitas DPRD	:	3,223,541,000	APBD
1 Pendalaman Tugas DPRD	:	2,995,510,000	APBD
2 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	:	228,031,000	APBD
5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	:	1,720,754,000	APBD
1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	:	9,287,000	APBD
2 Pelaksanaan Reses	:	1,711,467,000	APBD
6 Fasilitasi Tugas DPRD	:	3,731,567,000	APBD
1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	:	3,552,748,000	
2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	:	42,712,000	APBD
3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	:	136,107,000	APBD
Jumlah Anggaran	:	11,209,815,100	

Liwa, 24 Februari 2025





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GUY ZEFRED DA SILVA ML, S.STP**
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Kehumasan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

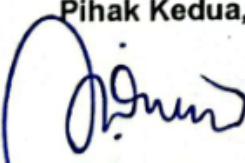
Nama : **PIRWAN, SE., M.M**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

PIRWAN, SE., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690310 199803 1 006

Pihak Pertama,

GUY ZEFRED DA SILVA ML, S.STP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800722 199810 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025

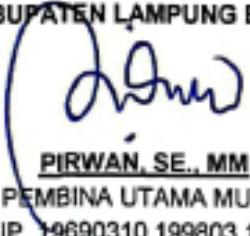
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	80.75
2	Terlaksananya Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	100,00%

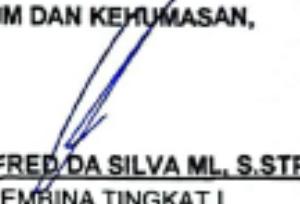
Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,288,955,050	APBD
1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7,377,500	APBD
1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7,377,500	APBD
1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,703,766,300	APBD
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	220,496,400	APBD
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204,235,000	APBD
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	331,408,700	
4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,250,000	APBD
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	293,475,400	APBD
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,349,400,000	APBD
7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	102,750,000	APBD
8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172,750,800	APBD
2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370,454,300	APBD
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000	APBD

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	:	185,750,000	APBD
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	:	177,704,300	APBD
3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	567,531,950	APBD
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	:	301,200,000	APBD
2 Pemeliharaan Mebel	:	21,500,000	APBD
3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	:	93,741,620	APBD
4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	:	151,090,330	APBD
4 Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	:	847,825,000	APBD
1 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	:	474,500,000	APBD
2 Pelaksanaan Medical Check UP DPRD	:	373,325,000	APBD
5 Layanan Administrasi DPRD		792,000,000	APBD
1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		792,000,000	APBD
2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	:	6,632,389,200	APBD
1 Peningkatan Kapasitas DPRD	:	2,914,479,200	APBD
1 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	:	42,920,000	APBD
2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	:	2,871,559,200	APBD
2 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	:	177,300,000	APBD
1 Kunjungan Kerja Dalam Daerah	:	177,300,000	APBD
3 Pembahasan Kerjasama Daerah	:	366,942,000	APBD
1 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	:	366,942,000	APBD

4 Fasilitasi Tugas DPRD	:	3,173,668,000	APBD
1 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	:	3,173,668,000	APBD
Jumlah Anggaran	:	11,921,344,250	

Liwa, 24 Februari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

PIRWAN, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690310 199803 1 006

KEPALA BAGIAN
UMUM DAN KEHUMASAN,

GUY ZEFRED DA SILVA ML, S.STP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800722 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HADI SUTANTO, S.Kom.,M.Si**
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **PIRWAN, SE., M.M**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

PIRWAN, SE., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690310 199803 1 006

Pihak Pertama,

HADI SUTANTO, S.Kom., M.Si
PEMBINA
NIP. 19820313 200804 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

**Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	80.75

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	18,517,286,730	APBD
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233,465,400	APBD
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah :	53,130,200	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD :	16,650,200	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD :	17,065,000	APBD
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD :	15,040,800	APBD
5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD :	15,367,000	APBD
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD :	15,212,200	APBD
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :	101,000,000	APBD
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,256,388,938	APBD
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN :	3,185,604,538	APBD
2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD :	10,900,200	
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD :	12,131,800	APBD
4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan :	22,748,000	

5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	:	12,900,000	APBD
6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	:	12,104,400	APBD
3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	:	10,572,000	APBD
1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	:	10,572,000	APBD
4 Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	:	206,900,000	APBD
1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	:	206,900,000	APBD
5 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	:	14,809,960,392	APBD
1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	:	14,809,960,392	APBD
Jumlah Anggaran	:	18,517,286,730	

Liwa, 24 Februari 2025



KEPALA BAGIAN KEUANGAN,
HADI SUTANTO, S.Kom, M.Si
PEMBINA
NIP. 19620313 200804 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GUNANTO, S.IP**
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **HADI SUTANTO, S.Kom.,M.Si**
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

HADI SUTANTO, S.Kom.,M.Si
PEMBINA
NIP. 19820313 200804 1 001

Pihak Pertama,

GUNANTO, S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19800514 199902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	11 Dokumen
2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
7	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan
8	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	244,037,400	APBD
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	233,465,400	APBD
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53,130,200	APBD

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	:	16,650,200	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	:	17,065,000	APBD
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	:	15,040,800	APBD
5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	:	15,367,000	APBD
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	:	15,212,200	APBD
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	101,000,000	APBD
2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	:	10,572,000	APBD
1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	:	10,572,000	APBD
Jumlah Anggaran	:	244,037,400	

Liwa, 24 Februari 2025

KEPALA BAGIAN KEUANGAN,

HADI SUTANTO, S.Kom., M.Si

PEMBINA

NIP. 19820313 200804 1 001

PERENCANAAN MUDA,

SUNANTO, S.IP

PENATA TINGKAT I

NIP. 19800514 199902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARDI SUSILO, S.T**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **HADI SUTANTO, S.Kom.,M.Si**
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

HADI SUTANTO, S.Kom., M.Si
PEMBINA
NIP. 19820313 200804 1 001

Pihak Pertama,

ARDI SUSILO, S.T
PENATA TINGKAT I
NIP. 19790608 200604 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

**Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan
5	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
6	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : DAERAH KABUPATEN/KOTA	277,684,400	
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :	70,784,400	APBD
1 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD :	10,900,200	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD :	12,131,800	APBD
3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan :	22,748,000	

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	:	12,900,000	APBD
5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	:	12,104,400	APBD
2 Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	:	206,900,000	APBD
1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		206,900,000	APBD
Jumlah Anggaran	:	277,684,400	

Liwa, 24 Februari 2025

KEPALA BAGIAN KEUANGAN,

HADI SUTANTO, S.Kom, M.Si

PEMBINA

NIP. 19820313 200804 1 001

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

ARDI SUSILO, ST

PENATA TINGKAT I

NIP. 19790608 200604 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WARYONO, S.IP**
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **HADI SUTANTO, S.Kom.,M.Si**
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

HADI SUTANTO S.Kom., M.Si
PEMBINA
NIP. 19690310 199803 1 006

Pihak Pertama,

WARYONO, S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19690914 200604 1 003

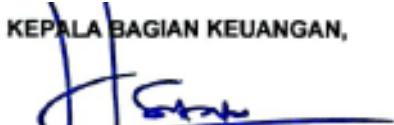
**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2024

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan
2	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan

Program		Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	: 17,995,564,930	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	: 3,185,604,538	APBD
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	: 3,185,604,538	APBD
2	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	: 14,809,960,392	APBD
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	: 14,809,960,392	APBD
Jumlah Anggaran		: 17,995,564,930	

Liwa, 24 Februari 2025

KEPALA BAGIAN KEUANGAN,

HADI SUTANTO, S.Kom, M.Si
PEMBINA
NIP. 19820313 200804 1 001

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

WARYONO, S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19690914 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANWAR SANI HALIK, SH., MM**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **M. AGUS SETIAWAN, S.E., MM**
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

M. AGUS SETIAWAN, S.E., MM
PEMBINA
NIP. 19710717 200003 2 003

Pihak Pertama,

ANWAR SANI HALIK, SH., MM
PENATA
NIP. 19790603 201001 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan
2	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan
3	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan
4	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9 Dokumen

Program		Anggaran	Keterangan
1	1 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	: 312,580,600	
1	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	: 312,580,600	APBD
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	: 98,965,400	APBD
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	: 108,071,000	APBD
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	: 105,544,200	APBD
2	Fasilitasi Tugas DPRD	: 3,552,748,000	APBD
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	: 3,552,748,000	APBD
Jumlah Anggaran		: 3,865,328,600	

Liwa, 24 Februari 2025

**KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

M. AGUS SETIAWAN, S.E., M.SI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710717 200003 2 003

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

ANWAR SANI HALIK, SH., MM
PENATA
NIP. 19790603 201001 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARDI SUSILO, ST**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **M. AGUS SETIAWAN, S.E., MM**
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

M. AGUS SETIAWAN, S.E., MM
PEMBINA
NIP. 19710717 200003 2 003

Pihak Pertama,

ARDI SUSILO, S.T
PENATA TINGKAT I
NIP. 19790608 200604 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen
2	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan
3	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen
4	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen
5	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen
6	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen
7	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen
8	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen
9	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	16 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	215,125,000	
1 Layanan Administrasi DPRD	215,125,000	APBD
1 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	66,360,000	APBD
2 Fasilitasi Fraksi DPRD	148,765,000	
2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1,308,300,500	
1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	842,948,500	APBD
1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	842,948,500	APBD

2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	:	329,245,000	APBD
1 Pembahasan KUA dan PPAS	:	49,482,500	APBD
2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	:	49,482,500	APBD
3 Pembahasan APBD	:	76,760,000	APBD
4 Pembahasan APBD Perubahan	:	76,760,000	APBD
5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	:	76,760,000	APBD
3 Fasilitasi Tugas DPRD		136,107,000	APBD
1 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	:	136,107,000	APBD
Jumlah Anggaran	:	1,523,425,500	

Liwa, 24 Februari 2025

KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


M. AGUS SETIAWAN, S.E., M.Si
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19710717 200003 2 003

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,


ARDI SUSILO, ST
 PENATA MINGKAT I
 NIP. 19790608 200604 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GUNANTO, S.IP.,MM**
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **M. AGUS SETIAWAN, S.E., MM**
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

M. AGUS SETIAWAN, S.E., MM
PEMBINA
NIP. 19710717 200003 2 003

Pihak Pertama,

GUNANTO, S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19800514 199902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen
3	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen
4	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 orang
5	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen
6	Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen
7	Tersusunnya Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	5,821,061,000	
1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan	: 834,054,000	APBD
1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	: 15,101,000	APBD
2 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	: 818,953,000	APBD
3 Penyusunan Tata Tertib		APBD
2 Peningkatan Kapasitas DPRD	3,223,541,000	APBD
1 Pendalaman Tugas DPRD	: 2,995,510,000	APBD

2 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	:	228,031,000	APBD
3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	:	1,720,754,000	APBD
1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	:	9,287,000	APBD
2 Pelaksanaan Reses	:	1,711,467,000	APBD
 4 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	:	-	APBD
1 Penyusunan Kode Etik DPRD	:		APBD
 Jumlah Anggaran	:	5,821,061,000	

Liwa, 24 Februari 2025

KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



M. AGUS SETIAWAN, S.E., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710717 200003 2 003

PERENCANAHIL MUDA,



DIANANTO, S.I.P
PENATA TINGKAT I
NIP. 19800514 199902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MANSON, S.E., M.M**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **GUY ZEFRED DA SILVA ML, S.STP**
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Kehumasan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

GUY ZEFRED DA SILVA ML, S.STP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800722 199810 1 001

Pihak Pertama,


MANSON, S.E., M.M
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP.19770620 201001 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

OPD : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6 Dokumen
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket
6	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
7	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
8	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
9	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
10	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit
11	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	53 Unit
12	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit
13	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit
14	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket
15	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang
16	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang	3 Paket

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH :	3,766,804,250	

1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	:	7,377,500	APBD
1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	:	7,377,500	APBD
2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	:	1,181,615,500	APBD
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	:	220,496,400	
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	204,235,000	APBD
3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	:	331,408,700	
4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	:	29,250,000	APBD
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	:	293,475,400	APBD
6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	:	102,750,000	APBD
3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	:	370,454,300	APBD
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	:	7,000,000	APBD
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	:	185,750,000	APBD
3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	:	177,704,300	APBD
4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	:	567,531,950	APBD
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	:		APBD
2 Pemeliharaan Mebel	:	21,500,000	APBD
3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	:	93,741,620	APBD
4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	:	151,090,330	APBD
4 Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	:	847,825,000	APBD
1 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	:	474,500,000	APBD
2 Pelaksanaan Medical Check UP DPRD	:	373,325,000	APBD
5 Layanan Administrasi DPRD	:	792,000,000	APBD
1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	:	792,000,000	APBD
Jumlah Anggaran	:	3,766,804,250	

Liwa, 24 Februari 2025

**KEPALA BAGIAN
UMUM DAN KEHUMASAN,**

GUY ZEFRED DA SILVA ML, S.STP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800722 199810 1 001

**KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN,**


MANSON, SE., MM
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP.19770620 201001 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ASRORUDDIN, S.IP.,MM**
Jabatan : Pranata Humas dan Protokol Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **GUY ZEFRED DA SILVA ML, S.STP**
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Kehumasan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

GUY ZEFRED DA SILVA ML, S.STP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800722 199810 1 001

Pihak Pertama,


ASRORUDDIN, S.IP.MM
PENATA TINGKAT I
NIP. 19811114 200701 1 003

PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: SEKRETARIAT DPRD
: 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
2	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan
3	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	9 Dokumen

Keterangan

Anggaran 172 750 800

KABUPATEN/KOTA

1 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKUSANAN TUGAS DAN FUNGSI
DPRD

1 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

1 Kunjungan Kerja Dalam Daerah

2 Fasilitasi Tugas DPRD

1 Easilitasi Tugas Pimpinan

Jumlah Anggaran

KEPALA BAGIAN
UMUM DAN KEHUMASAN

PRANATA HUMAS,

GUY ZEFRED DA SILVA ML. S.STP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800722 199810 1 001

ASRORUDDIN, S.I.P., MM
PENATA TINGKAT 1
NIP. 19811114 2007011003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YADI FAHROZI, S.Kom, M.Si**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Humas dan Dokumentasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **GUY ZEFRED DA SILVA ML, S.STP**
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Kehumasan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,

GUY ZEFRED DA SILVA ML, S.STP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800722 199810 1 001

Pihak Pertama,

YADI FAHROZI, S.Kom., M.Si
PENATA
NIP. 19841203 201101 1 00

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	90 Dokumen
2	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen
3	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	4 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH : KABUPATEN/KOTA	1,349,400,000	
1 Administrasi Umum Perangkat Daerah :	1,349,400,000	APBD
1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1,349,400,000	APBD
2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	3,281,421,200	
1 Peningkatan Kapasitas DPRD	2,914,479,200	APBD
1 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	42,920,000	APBD
2 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2,871,559,200	APBD

2 Pembahasan Kerja Sama Daerah	:	366,942,000	APBD
1 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	:	366,942,000	APBD

Jumlah Anggaran	:	4,630,821,200
-----------------	---	---------------

Liwa, 24 Februari 2025

KEPALA BAGIAN
UMUM DAN KEHUMASAN,

GUY ZEFRED DA SILVA ML, S.STP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19800722 199810 1 001

KEPALA SUB BAGIAN
HUMAS DAN DOKUMENTASI,

YADI FAHROZI, S.Kom., M.Si
PENATA
NIP. 19841203 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDRI SUSANTO, S.Sos**
Jabatan : Pelaksana Subbag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **MANSON, S.E., M.M**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Kasubag Umum dan Kepegawaian)


MANSON, S.E., M.M
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19770620 201001 1 008

Pihak Pertama,


ANDRI SUSANTO, S.Sos
PENATA MUDA
NIP. 19810521 200902 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

**Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraannya	23 Unit
2	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	53 Unit
3	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah administrasi yang disiapkan	5 Unit
4	Melaksanakan kebutuhan administrasi kontrak pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah dokumen kontrak Medical Check Up DPRD	1 Dokumen
5	Melaksanakan Kebutuhan administrasi kontrak pelaksanaan pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah dokumen kontrak pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1 Dokumen

Liwa, 24 Februari 2025

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

MANSON, S.E., M.M
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP.19770620 201001 1 008

STAF PELAKSANA,

ANDRI SUSANTO, S.Sos
PENATA MUDA
NIP. 19810521 200902 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BELLY PUTRA WINATA, S.E**
Jabatan : Pelaksana Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **WARYONO, S.IP**
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Analis Keuangan Pusat dan Daerah)

WARYONO, S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19690914 200604 1 003

Pihak Pertama,

BELLY PUTRA WINATA, S.E
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19810512 201001 1 011

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: SEKRETARIAT DPRD
: 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Bendahara Gaji	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan
2	Melaksanakan penatausahaan dan pengadmsitrasi keuangan (Pengajuan SPP GU, SPP LS)	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan

Liwa, 24 Februari 2025

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH,


WARYONO, S.I.P
PENATA TINGKAT I
NIP. 19690914 200604 1 003


STAF PELAKSANA,
BELLY PUTRA WINATA, SE
PENATA MUDA
NIP. 19810512 201001 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEDDI SUBARKAH, S.I.Kom**
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kehumasan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ASRORUDDIN, S.IP.,MM**
Jabatan : Pranata Humas dan Protokol Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Kasubag Umum dan Kepegawaian)

ASRORUDDIN, S.IP.,MM
PENATA TINGKAT I
NIP. 19811114 200701 1 003

Pihak Pertama,

DEDDI SUBARKAH, S.I.Kom
PENATA MUDA
NIP. 19830415 200902 1 005

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan kebutuhan administrasi terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Badan-badan	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pimpinan dan Badan-badan	4 Laporan
2	Melaksanakan kebutuhan administrasi terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Badan-badan Luar Daerah	9 Laporan

Liwa, 24 Februari 2025

PRANATA HUMAS,

ASRORUDDIN, S.I.P, MM

PENATA TINGKAT 1
NIP. 19811114 200701 1 003

STAF PELAKSANA,

DEDDI SUBARKAH, S.I.Kom
PENATA MUDA
NIP. 19830415 200902 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEVIDSON ALI, S.E**
Jabatan : Pelaksana Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **WARYONO, S.IP**
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Analis Keuangan Pusat dan Daerah)

WARYONO, S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19690914 200604 1 003

Pihak Pertama,

DEVIDSON ALI, S.E
PENATA MUDA
NIP. 19861228 202203 1 002

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: SEKRETARIAT DPRD
: 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan penatausahaan dan pengadministrasian keuangan Perangkat daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian keuangan Perangkat daerah	12 Bulan

Liwa, 24 Februari 2025

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH,



WARYONO, S.I.P
PENATA TINGKAT I
NIP. 19690914 200604 1 003

STAF PELAKSANA,



DEVIDSON ALI, SE
PENATA MUDA
NIP. 19861228 202203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EKO SUJANARKO, S.E**
Jabatan : Pelaksana Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ANWAR SANI HALIK, SH., MM**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Analis Kebijakan Ahli Muda)

ANWAR SANI HALIK, SH., MM
PENATA
NIP. 19790603 201001 1 004

Pihak Pertama,

EKO SUJANARKO, S.E
PENATA
NIP. 19750516 201001 1 003

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: SEKRETARIAT DPRD
: 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan kebutuhan administrasi dan surat menyurat dalam rangka pelaksanaan pengawasan dibidang kesejahteraan rakyat	Jumlah pelaksanaan pengawasan	4 kali
2	Menyiapkan kebutuhan administrasi dan surat menyurat dalam rangka pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dibidang kesejahteraan rakyat	Jumlah dokumen pelaksanaan	9 Dokumen

Liwa, 24 Februari 2025

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

ANWAR SANI HALIK, SH., MM

PENATA

NIP. 19790603 201001 1 004

STAF PELAKSANA,

EKO SUJANARKO, SE

PENATA MUDA TINGKAT I

NIP. 19750516 201001 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERZA DWI PERLINA, S.IP**
Jabatan : Pelaksana Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ARDI SUSILO, S.T**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Analis Kebijakan Ahli Muda)

ARDI SUSILO, S.T
PENATA TINGKAT I
NIP. 19790608 200604 1 004

Pihak Pertama,

ERZA DWI PERLINA, S.IP
PENATA
NIP. 19760211 200701 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: SEKRETARIAT DPRD
: 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan persiapan dan pengumpulan dokumen dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang disiapkan	1 Dokumen
2	Melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi berkas pertanggungjawaban pelaksanaan sub kegiatan dari setiap bagian	Jumlah Bagian yang dilakukan pemeriksaan dan verifikasi berkas	3 Bagian
3	Melaksanakan penginputan data AKRUAL	Jumlah bulan pelaksanaan penginputan data akrual	12 Bulan
4	Melaksanakan Persiapan Administrasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sekretariat DPRD	Jumlah persiapan administrasi dan Pertanggungjawaban Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sekretariat DPRD yang dilaksanakan	7 Kali

Liwa, 24 Februari 2025

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

ARDI SUSILO, ST
PENATA TINGKAT I
NIP. 19790608 200604 1 013

STAF PELAKSANA,



ERZA DWI PERLINA,S.I.P
PENATA
NIP. 19760211 200701 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EVA SUPRIYANTI, S.Pd**
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kehumasan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ASRORUDDIN, S.IP.,MM**
Jabatan : Pranata Humas dan Protokol Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

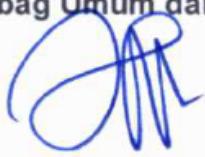
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Kasubag Umum dan Kepegawaian)



ASRORUDDIN, S.IP.,MM
PENATA TINGKAT I
NIP. 19811114 200701 1 003

Pihak Pertama,



EVA SUPRIYANTI, S.Pd
PENATA
NIP. 19780713 200801 2 017

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan kebutuhan administrasi terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12 Laporan

Liwa, 24 Februari 2025

KEPALA BAGIAN
PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

M. AGUS SETIAWAN, S.E., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710717 200003 2 003

STAF PELAKSANA,

EVA SUPRIYANTI, S.Pd
PENATA TINGKAT I
NIP. 19780713 200801 2 017



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAIRUL, S.H**
Jabatan : Pelaksana Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **GUNANTO, S.IP**
Jabatan : Plt. Kasubbag Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Plt. Kasubbag Perundang-undangan)

GUNANTO, S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19800514 199902 1 001

Pihak Pertama,

HAIRUL, S.H
PENATA MUDA
NIP. 19981014 202203 1 009

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

**Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mempersiapkan kebutuhan administrasi kontrak untuk kebutuhan Naskah Akademik Penyusunan Ranperda Inisiaif	Jumlah dokumen Kontrak Naskah Akademis	2 Dokumen
2	Mempersiapkan kebutuhan administrasi penyusunan Ranperda Inisiaif DPRD	Jumlah dokumen Kontrak Naskah Akademis	2 Dokumen
3	Mempersiapkan kebutuhan administrasi pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen
4	Melaksanakan pengumpulan kebutuhan penyusunan Laporan Kinerja DPRD (SK DPRD, SK Pimpinana DPRD dan Risalah Rapat)	Jumlah Laporan Penyusunana Laporan Kinerja	1 Laporan

Liwa, 24 Februari 2025


PERENCANA AHLI MUDA
GUHANTO, S.I.P
PENATA TINGKAT I
NIP. 19800514 199902 1 001


STAF PELAKSANA
NARUL, S.H
PENATA MUDA
NIP. 19981014 202203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERI KURNIAWAN, S.E**
Jabatan : Pelaksana Subbag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **MANSON, S.E., M.M**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Kasubag Umum dan Kepegawaian)

MANSON, S.E., M.M
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19770620 201001 1 008

Pihak Pertama,

HERI KURNIAWAN, S.E
PENATA MUDA
NIP. 1976009 201001 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: SEKRETARIAT DPRD
: 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan	1 Laporan
2	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa telpon, air dan listrik yang dibayar	1 Laporan
3	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	32 Unit

Liwa, 24 Februari 2025

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN,


MANSON, S.E., MM
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP.19770620 201001 1 008

STAF PELAKSANA,


HERI KURMIAWAN, SE
PENATA MUDA
NIP. 197609 201001 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HILDAYATI, S.E**
Jabatan : Pelaksana Subbag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **MANSON, S.E., M.M**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Kasubag Umum dan Kepegawaian)

MANSON, S.E., M.M
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP.19770620 201001 1 008

Pihak Pertama,

HILDAYATI, S.E
PENATA MUDA
NIP. 19780402 201001 2 003

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

**Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Laporan
2	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan penyediaan pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
3	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan
4	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah laporan penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1 Dokumen

Liwa, 24 Februari 2025

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

MANSON, S.E., M.M
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19770620 201001 1 008

STAF PELAKSANA,

HILDAYATI, SE
PENATA MUDA
NIP. 19780402 201001 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IRWANTONI, S.H**
Jabatan : Pelaksana Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ANWAR SANI HALIK, SH., MM**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Analis Kebijakan Ahli Muda)

ANWAR SANI HALIK, SH., MM
PENATA
NIP. 19790603 201001 1 004

Pihak Pertama,

IRWANTONI, S.H
PENATA
NIP. 19750901 200604 1 012

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: SEKRETARIAT DPRD
: 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan kebutuhan administrasi dan surat menyurat dalam rangka pelaksanaan pengawasan dibidang perekonomian	Jumlah pelaksanaan pengawasan	4 kali
2	Menyiapkan kebutuhan administrasi dan surat menyurat dalam rangka pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dibidang perekonomian	Jumlah dokumen pelaksanaan	9 Dokumen

Liwa, 24 Februari 2025

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

ANWAR SANI HALIK, SH., MM.
PENATA
NIP. 19790603 201001 1 004

STAF PELAKSANA,

IRWANTONI, SH
PENATA
NIP. 19750901 200604 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JAHRI, S.E**
Jabatan : Pelaksana Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ANWAR SANI HALIK, SH., MM**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Analis Kebijakan Ahli Muda)

ANWAR SANI HALIK, SH., MM
PENATA
NIP. 19790603 201001 1 004

Pihak Pertama,

JAHRI, S.E
PENATA MUDA
NIP. 19850418 200902 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: SEKRETARIAT DPRD
: 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan kebutuhan administrasi dan surat menyurat dalam rangka pelaksanaan pengawasan dibidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah pelaksanaan pengawasan	4 kali
2	Menyiapkan kebutuhan administrasi dan surat menyurat dalam rangka pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dibidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah dokumen pelaksanaan	9 Dokumen

Liwa, 24 Februari 2025

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

ANWAR SANI HALIK, SH., MM

PENATA

NIP. 19790603 201001 1 004

STAF PELAKSANA,

JAHRI, S.E

PENATA MUDA

NIP. 19850418 200902 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LEKAT DERIA**
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Humas dan Dokumentasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **YADI FAHROZI, S.Kom, M.Si**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Humas dan Dokumentasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Kasubag Humas dan Dokumentasi)

YADI FAHROZI, S.Kom., M.Si
PENATA
NIP. 19841203 201101 1 001

Pihak Pertama,

LEKAT DERIA
PENGATUR TINGKAT I
NIP. 19841203 201101 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

**Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan kebutuhan administrasi penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Laporan
2	Melaksanakan kebutuhan administrasi Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Laporan pelaksanaan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Laporan
3	Melaksnakan kebutuhan administrasi Silaturahmi dan Forum Diskusi	Jumlah Jumlah Laporan pelaksanaan Silaturahmi dan Forum Diskusi	1 Laporan

Liwa, 24 Februari 2025

**KEPALA SUB BAGIAN
HUMAS DAN DOKUMENTASI,**


YADI FAHROZI, S.Kom., M.Si
PENATA TINGKAT I
NIP. 19841203 201101 1 001

STAF PELAKSANA,


LEKAT DERIA
PENGATUR TINGKAT I
NIP. 19841203 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LILIS ANDRIYANI, S.E**
Jabatan : Pelaksana Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **GUNANTO, S.IP**
Jabatan : Plt. Kasubbag Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Plt. Kasubbag Perundang-undangan)

GUNANTO, S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19800514 199902 1 001

Pihak Pertama,

LILIS ANDRIYANI, S.E
PENATA MUDA
NIP. 19830906 200902 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

**Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mempersiapkan Kebutuhan Administrasi Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (SK Tenaga ahli, Tanda terima honor Tenaga Ahli Fraksi, pertanggungjawaban sub kegiatan)	Jumlah Laporan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Pelaksanaan Reses	1 Laporan
2	Melaksanakan rekapitulasi dan input data Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD di aplikasi SIPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen
3	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan Reses (Surat dan berkas administrasi dan menyusun pertanggungjawaban kegiatan reses)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Reses	3 Laporan

Liwa, 24 Februari 2025

PERENCANA AHLI MUDA

GUNANTO, S.I.P
PENATA TINGKAT I
NIP. 19800514 199902 1 001

STAF PELAKSANA,

LILIS ANDRIYANI, SE
PENATA MUDA
NIP. 19830906 200902 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD MA'RUF, S.A.N**
abatan : Pelaksana Persidangan dan Perundang-undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ARDI SUSILO, ST**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Analis Kebijakan Ahli Muda)

ARDI SUSILO, S.T
PENATA TINGKAT I
NIP. 19790608 200604 1 004

Pihak Pertama,

MUHAMMAD MA'RUF, S.A.N
PENATA MUDA
NIP. 19960510 202203 1 009

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

**Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan kebutuhan administrasi Rapat Paripurna Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD (Surat, undangan rapat, risalah dan pertanggungjawaban kegiatan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan Rapat Paripurna Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD	1 Laporan
2	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan Rapat Pembahasan Rancangan Perda (Surat, undangan rapat, risalah dan pertanggungjawaban kegiatan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembahasan Ranperda	1 Laporan
3	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan Rapat Pembahasan KUA dan PPAS (Surat, undangan rapat, risalah dan pertanggungjawaban kegiatan) Terlaksananya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Pembahasan KUA dan PPAS	1 Laporan
4	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Surat, undangan rapat, risalah dan pertanggungjawaban kegiatan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Laporan
5	Melaksanakan kebutuhan administrasi pelaksanaan Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Surat, undangan rapat, risalah dan pertanggungjawaban kegiatan)	Jumlah Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Laporan

Liwa, 24 Februari 2025

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

ARDI SUSILO, ST
PENATA TINGKAT I
NIP. 19790608 200604 1 013

STAF PELAKSANA,



MUHAMMAD MA'RUF, S.A.N
PENATA MUDA
NIP. 19960510 202203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MISKATUL'AINI, S.IP**
Jabatan : Pelaksana Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ARDI SUSILO, S.T**
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Analisis Kebijakan Ahli Muda)


ARDI SUSILO, S.T
PENATA TINGKAT I
NIP. 19790608 200604 1 004

Pihak Pertama,


MISKATUL'AINI, S.IP
PENATA
NIP. 19790804 200701 2 005

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

**Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD
Tahun Anggaran : 2025**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan pengumpulan dokumen dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen yang disiapkan	2 Dokumen
2	Melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi pengajuan Nota Dinas Permintaan Anggaran sub kegiatan dari setiap bagian	Jumlah Bagian yang dilakukan pemeriksaan dan verifikasi nota dinas pengajuan anggaran	3 Bagian
3	Melaksanakan penginputan data AKRUAL	Jumlah bulan pelaksanaan penginputan data akrual	12 Bulan
4	Melaksanakan pengumpulan dokumen dalam rangka persiapan penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen yang disiapkan	2 Dokumen

Liwa, 24 Februari 2025

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA,

ARDI SUBILO, ST
PENATA TINGKAT I
NIP. 19790608 200604 1 013

STAF PELAKSANA,


MISKATUL'AINI, S.I.P
PENATA
NIP. 19790804 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI ZAINAB, S.IP., M.M**
Jabatan : Pelaksana Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **WARYONO, S.IP**
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Analis Keuangan Pusat dan Daerah)

WARYONO, S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19690914 200604 1 003

Pihak Pertama,

SITI ZAINAB, S.IP., M.M
PENATA
NIP. 19730123 200012 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: SEKRETARIAT DPRD
: 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Bendahara Pengeluaran	Jumlah bulan pelaksanaan pengadministrasian pengeluaran	12 Bulan
2	Melaksanakan kebutuhan administrasi pencairan dan pembayaran gaji Anggota DPRD	Jumlah bulan pelaksanaan pencairan dan pembayaran gaji Anggota DPRD	12 Bulan
3	Melaksanakan penatausahaan dan pengadministrasian keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penatausahaan dan pengadministrasian keuangan Perangkat daerah	12 Bulan

Liwa, 24 Februari 2025

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH,



WARYONO, S.I.P
PENATA TINGKAT I
NIP. 19690914 200604 1 003

STAF PELAKSANA,



SITI ZAINAB, S.I.P., MM
PENATA MUDA
NIP. 19730123 200012 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUTRISNO, S.E**
Jabatan : Pelaksana Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **GUNANTO, S.IP**
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Perencana Ahli Muda)

GUNANTO, S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19800514 199902 1 001

Pihak Pertama,

SUTRISNO, S.E
PENATA
NIP. 19720810 200801 1 023

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: SEKRETARIAT DPRD
: 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan pengumpulan data dan penginputan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen
2	Melaksanakan Administrasi pelaksanaan kontrak survey kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD	Jumlah dokumen kontrak yang disiapkan	1 Dokumen

Liwa, 24 Februari 2025

PERENCANA AHLI MUDA,

GUNANTO, S.I.P.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19800514 199902 1 001

STAF PELAKSANA,

SUTRISNO, SE
PENATA
NIP. 19720810 200801 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH**

Komplek Pemda Lampung Barat Jalan Raden Intan II Nomor 2
Way Mengaku Telp. (0724) 21112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VIVI NINGTIA SARI, S.E**
Jabatan : Pelaksana Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **GUNANTO, S.IP**
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

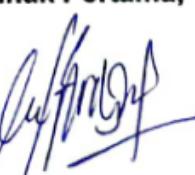
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 24 Februari 2025

Pihak Kedua,
(Perencana Ahli Muda)


GUNANTO, S.IP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19800514 199902 1 001

Pihak Pertama,


VIVI NINGTIA SARI, S.E
PENATA MUDA
NIP. 19950408 202203 2 006

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: SEKRETARIAT DPRD
: 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan Administrasi surat menyurat kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah surat kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Surat
2	Melaksanakan pengumpulan usulan RKA dan rekapitulasi kegiatan dari masing-masing Bagian	Jumlah dokumen usulan RKA Sub Kegiatan	54 Dokumen
3	Melaksanakan pengumpulan usulan Perubahan RKA dan rekapitulasi kegiatan dari masing-masing Bagian	Jumlah Dokumen usulan Perubahan RKA-SKPD yang disusun	8 Dokumen
4	Melaksanakan finalisasi DPA SKPD yang telah disusun (Penandatangan DPA oleh kepala OPD, mendistribusikan ke masing-masing Bagian)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang diselesaikan	1 Dokumen
5	Melaksanakan finalisasi Perubahan DPA SKPD yang telah disusun (Penandatangan Perubahan DPA oleh kepala OPD, mendistribusikan ke masing-masing Bagian)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen

Liwa, 24 Februari 2025

PERENCANA AHLI MUDA,

GUMANTO, S.JP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19800514 199902 1 001

STAF RELAKSANA

VIVI NINGTIA SARI, SE
PENATA MUDA
NIP. 19950408 202203 2 006